



**PENGEMBANGAN BAHAN AJAR IPS SEJARAH
KEBIJAKAN SISTEM POLITIK KOLONIAL HINDIA
BELANDA TAHUN 1830-1920 DI INDONESIA PADA SISWA
KELAS VIII SMP N 2 KENDAL TAHUN AJARAN 2015-2016**

SKRIPSI

Disusun guna meraih Gelar Sarjana Pendidikan

Oleh :

Slamet Wakhidin

3101412122

UNNES
UNIVERSITAS NEGERI SEMARANG

**JURUSAN SEJARAH
FAKULTAS ILMU SOSIAL
UNIVERSITAS NEGERI SEMARANG**

2016

PERSETUJUAN PEMBIMBING

Skripsi ini telah disetujui oleh pembimbing untuk diajukan ke Sidang Panitia Ujian

Skripsi Fakultas Ilmu Sosial Unnes pada :

Hari : Kamis

Tanggal : 19 Mei 2016

Pembimbing I



Prof. Dr. Wasino, M.Hum
NIP. 19640805 198901 1 001

Pembimbing II



Andy Suryadi, S.Pd., M.Pd
NIP. 19791124 200604 1 001

UNNES
Mengetahui:

UNIVERSITAS NEGERI SURABAYA
Ketua Jurusan Sejarah FIS Unnes



Dr. Hamdan Tji Atmaja, M.Pd
NIP. 19640603 198901 1 001

PENGESAHAN KELULUSAN

Skripsi ini telah dipertahankan di depan Sidang Panitia Ujian Skripsi Fakultas Ilmu Sosial, Universitas Negeri Semarang pada:

Hari : Kamis

Tanggal : 9 Juni 2016

Penguji I



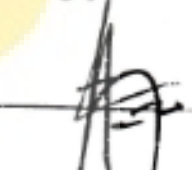
Dr. Suwito Eko Pramono, M.Pd
NIP. 19580920 198503 1 003

Penguji II



Prof. Dr. Wasino, M.Hum
NIP. 19640805 198901 1 001

Penguji III



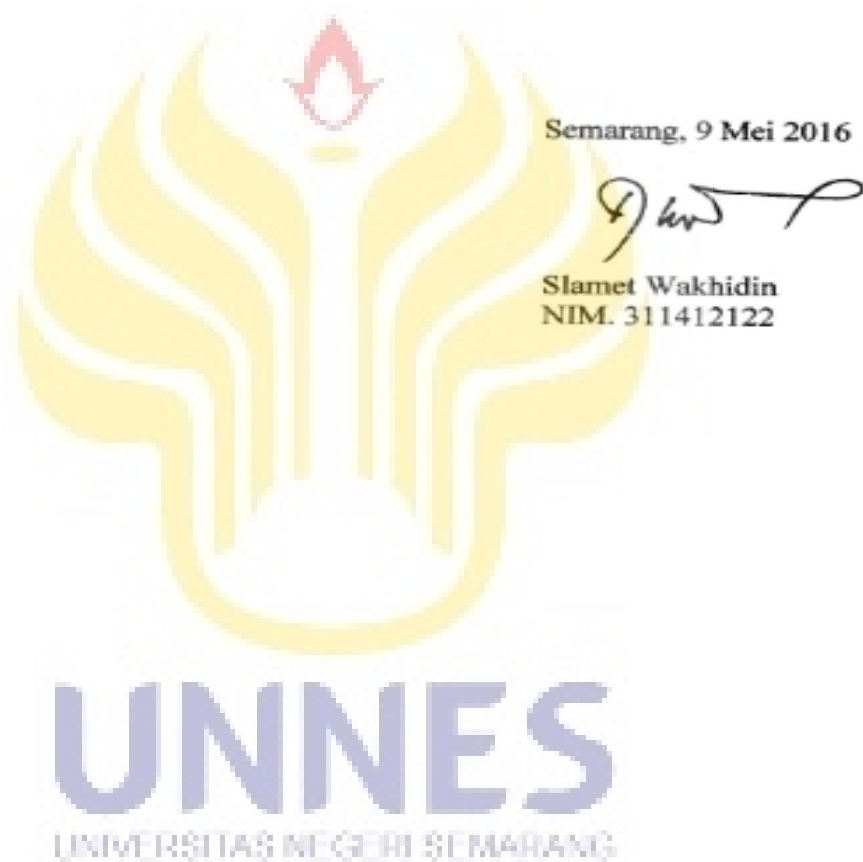
Andy Suryadi, S.Pd., M.Pd
NIP. 19791124 200604 1 001

UNNES



PERNYATAAN

Saya menyatakan bahwa yang tertulis pada skripsi ini benar-benar hasil karya saya sendiri, bukan merupakan plagiat dari karya orang lain, baik sebagian atau seluruhnya. Pendapat atau temuan orang lain yang terdapat dalam skripsi ini dikutip dan dirujuk berdasarkan kode etik ilmiah.



MOTTO DAN PERSEMBAHAN

Motto

- *Jika kamu berbuat baik, berarti kamu berbuat baik bagi dirimu sendiri, dan sebaliknya jika kamu berbuat jahat, maka kejahatan itu untuk dirimu sendiri pula (QS. Al-Isra':7)*
- *Belajar dari masa lalu, hidup untuk masa kini dan berharap untuk masa yang akan datang (Albert Einstein)*
- *Kamu hanya hidup sekali, jika kamu melakukannya dengan benar, satu kali saja sudah cukup (Mae West)*
- *Berbaktilah kepada kedua orang tua jika hidupmu ingin mendapatkan keberkahan (Penulis)*

Persembahan

- *Allah SWT yang telah memberikan kesehatan, kecerdasan, ketenangan jiwa dan fikiran penyusun dalam menyusun skripsi ini*
- *Bapak Subandi dan Ibu Sudjiati selaku kedua orang tuaku yang senantiasa memberikan doa dan semangat dalam kelancaran penyusunan skripsi*
- *Kakakku Siti Maghfiroh dan Ahmad Ridzo'i yang senantiasa mendukung saya dalam meraih pendidikan tinggi*
- *Bapak Ibu dosen Sejarah FIS Unnes yang telah memberikan ilmu yang bermanfaat kepada penyusun*
- *Teman seperjuangan rombel bilingual angkatan 2012*
- *Teman-teman seangkatan 2012 jurusan sejarah FIS Unnes*

PRAKATA

Puji syukur penulis panjatkan kehadirat Allah SWT atas segala nikmat berupa kesehatan, kesempatan dan nikmat-Nya yang begitu besar yang telah diberikan kepada penulis sehingga dapat menyelesaikan skripsi dengan judul “Pengembangan Bahan Ajar Sejarah Kebijakan Sistem Politik Kolonial Hindia Belanda Tahun 1830-1920 di Indonesia” dapat berjalan dengan baik dan lancar. Skripsi ini diajukan sebagai syarat untuk memperoleh gelar Sarjana Pendidikan di Universitas Negeri Semarang.

Dalam penyusunan skripsi, penulis banyak menemui kendala, namun berkat bimbingan serta bantuan dari berbagai pihak, skripsi ini dapat selesai. Oleh karena itu, penulis menyampaikan rasa hormat dan terimakasih kepada:

1. Prof. Dr. Fathur Rokhman, M.Hum selaku Rektor Universitas Negeri Semarang atas kesempatan yang diberikan kepada penulis untuk belajar di Unnes dengan segala kewibawaanya
2. Drs. Moh. Solehatul Mustofa, MA, Dekan Fakultas Ilmu Sosial Universitas Negeri Semarang atas semua dukungan yang telah diberikan
3. Dr. Hamdan Tri Atmaja, M.Pd, Ketua Jurusan Sejarah yang telah memberi ijin penelitian dan dukungannya
4. Prof. Dr. Wasino, M.Hum dan Andy Suryadi, S.Pd.,M.Pd, Dosen Pembimbing yang telah memberikan bimbingan, arahan dan motivasi kepada penulis selama proses penyusunan skripsi
5. Sri Hardanto, S.Pd.,MM, Kepala SMP N 2 Kendal yang telah memberikan izin kepada penulis untuk mengadakan penelitian di sekolah

6. Drs. Akhmad Su'udi dan Nadhirin, S.Pd Guru SMP N 2 Kendal yang telah bersedia menjadi informan, validator ahli materi dan membimbing penulis
7. Siswa-siswi SMP N 2 Kendal kelas VIII E, D dan G yang memberikan dukungannya dan bersedia menjadi objek penelitian
8. Seluruh keluarga besar Jurusan Sejarah angkatan 2012 yang telah memberikan motivasi, semangat dan dukungannya sehingga skripsi ini dapat terselesaikan
9. Kedua orang tua dan keluarga tercinta yang telah memberikan doa, dukungan dan semangat dalam penyusunan skripsi
10. Semua pihak yang secara langsung maupun tidak langsung ikut terlibat dalam penyusunan skripsi ini

Semoga dengan iringan doa skripsi ini dapat bermanfaat dalam lingkungan pendidikan.



Semarang, 9 Juni 2016

Penyusun

SARI

Wakhidin, Slamet. 2016. *Pengembangan Bahan Ajar IPS Sejarah Kebijakan Sistem Politik Kolonial Hindia Belanda Tahun 1830-1920 di Indonesia Pada Siswa Kelas VIII SMP N 2 Kendal Tahun Ajaran 2015-1016*. Skripsi. Jurusan Sejarah. Fakultas Ilmu Sosial. Universitas Negeri Semarang. Pembimbing Prof. Dr. Wasino, M.Hum dan Andy Suryadi, S.Pd., M.Pd

Kata Kunci : Pengembangan, Bahan Ajar, IPS Sejarah, Kebijakan Kolonial

Studi pendahuluan yang dilakukan peneliti di SMP N 2 Kendal tahun ajaran 2015-2016 menunjukkan bahwa dalam pembelajaran IPS Sejarah materi sejarah Kebijakan Kolonial di Indonesia hanya menggunakan buku paket siswa dan LKS yang disediakan disekolah. Bahan ajar yang terbatas serta konten materi yang kurang lengkap pada bahan ajar yang tersedia disekolah terutama pada materi kebijakan kolonial di Indonesia menunjukkan hasil belajar siswa yang rendah.

Tujuan dari penelitian ini antara lain: (1) Mendeskripsikan kondisi awal sumber belajar dilapangan sebelum dikembangkan bahan ajar, (2) Menganalisis dan menghasilkan model pengembangan bahan ajar, (3) Mengetahui dan menganalisis kelayakan *handout* Kebijakan Sistem Politik Kolonial Hindia Belanda Tahun 1830-1920 di Indonesia di lihat dari hasil validasi yang dilakukan oleh ahli materi dan media serta tanggapan Guru dan Siswa.

Metode yang digunakan dalam penelitian ini berbentuk *Research And Development* dengan pendekatan kualitatif yang dikelompokkan menjadi tiga tahapan yaitu tahap pendahuluan, tahap pengembangan dan tahap evaluasi. Dari masing-masing tahapan terbagi menjadi sumber data, teknik pengambilan data, uji objektivitas data, teknik analisis data dan hasil. Teknik pengambilan sampel yang dilakukan peneliti yaitu teknik *purposive sampling* dikarenakan peneliti sudah mengetahui dan memahami kondisi dimana lokasi penelitian merupakan tempat peneliti menjadi guru praktikan.

Hasil dari penelitian ini menunjukkan bahwa buku ajar yang tersedia disekolah berupa buku paket, LKS dan model ceramah digunakan guru dalam mengajar sehingga minat siswa dalam belajar IPS sejarah rendah. Berdasarkan tingkat kelayakan hasil validasi ahli materi dan ahli media *handout* menunjukkan hasil 95,07 % untuk validasi ahli materi I dan 94,54 % untuk hasil validasi ahli materi II, serta 92,89 % untuk validasi ahli media I dan 94,96 % untuk validasi ahli media II. Selain itu didapat hasil analisis tanggapan guru sebesar 96,25 %, serta hasil analisis tanggapan peserta didik sebesar 90,12 %. Dengan demikian *handout* ini layak digunakan sebagai bahan ajar sejarah materi kebijakan kolonial di Indonesia. Saran yang dapat diberikan yaitu *handout* yang telah dikembangkan dalam penelitian ini dapat digunakan dalam pembelajaran IPS Sejarah Kelas VIII materi kebijakan kolonial di Indonesia di SMP N 2 Kendal.

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL	i
PERSETUJUAN PEMBIMBING	ii
PENGESAHAN KELULUSAN	iii
PERNYATAAN	iv
MOTTO DAN PERSEMBAHAN	v
PRAKATA	vi
SARI	viii
DAFTAR ISI	ix
DAFTAR TABEL	x
DAFTAR GAMBAR.....	xi
DAFTAR LAMPIRAN	xii
BAB I PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang Masalah	1
B. Rumusan Masalah	6
C. Tujuan Penelitian	6
D. Manfaat Penelitian	7
E. Batasan Istilah	8
BAB II TINJAUAN PUSTAKA	14
A. Penelitian Terdahulu	14
B. Landasan Teori	16
C. Pembelajaran IPS Sejarah	54
D. Kerangka Berfikir	57
BAB III METODE PENELITIAN	58
A. Desain Penelitian	58
B. Prosedur Penelitian	59
C. Tahapan Penelitian Pengembangan	81
BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN	87
A. Hasil Penelitian	87
B. Pembahasan	110
BAB V SIMPULAN DAN SARAN	116
A. Simpulan	116
B. Saran	117
DAFTAR PUSTAKA	118
LAMPIRAN	121

DAFTAR TABEL

Tabel 1. Jenis tanaman pada masa Tanam Paksa dan Luas lahan	29
Tabel 2. Tahapan Metode Penelitian	61
Tabel 3. Kriteria Kelayakan Bahan Ajar	74
Tabel 4. Rentang presentase dan data hasil validasi ahli materi dan ahli media	80
Tabel 5. Daftar Nama Validator	84
Tabel 6. Rekapitulasi Hasil Validasi Tahap I Oleh Ahli Materi	104
Tabel 7. Rekapitulasi Hasil Validasi Tahap I Oleh Ahli Media	105
Tabel 8. Saran dan Masukan Pada Validasi Tahap I	106
Tabel 9. Rekapitulasi Hasil Validasi Tahap II Oleh Ahli Materi	107
Tabel 10. Rekapitulasi Hasil Validasi Tahap II Oleh Ahli Media	107
Tabel 11. Rekapitulasi Hasil Validasi Tanggapan Guru	108
Tabel 12. Rekapitulasi Hasil Validasi Tanggapan Siswa	109



DAFTAR GAMBAR

Gambar 1. Skema Kerangka berfikir	57
Gambar 2. Komponen Analisis Data Interaktif	71
Gambar 3. Alur Desain Produk Bahan Ajar	83
Gambar 4. Prosedur Penelitian	86
Gambar 5. Desain Cover Sebelum Revisi	100
Gambar 6. Desain Cover Sesudah Revisi	102



LAMPIRAN

Lampiran 1. Instrumen Wawancara Kebutuhan Awal	121
Lampiran 2. Transkrip Hasil Wawancara Guru	122
Lampiran 3. Transkrip Hasil Wawancara Siswa	124
Lampiran 4. Silabus	126
Lampiran 5. RPP	136
Lampiran 6. Angket Kebutuhan Terhadap Bahan Ajar	145
Lampiran 7. Instrumen Validasi Materi Tahap I	168
Lampiran 8. Hasil Analisis Validasi Materi Tahap I	180
Lampiran 9. Instrumen Validasi Media Tahap I	185
Lampiran 10. Hasil Analisis Validasi Media Tahap I	192
Lampiran 11. Instrumen Validasi Materi Tahap II	195
Lampiran 12. Hasil Analisis Validasi Materi Tahap II	207
Lampiran 13. Instrumen Validasi Media Tahap II	212
Lampiran 14. Hasil Analisis Validasi Media Tahap II	218
Lampiran 15. Angket Tanggapan Guru	221
Lampiran 16. Hasil Analisis Angket Tanggapan Guru	225
Lampiran 17. Angket Tanggapan Siswa	227
Lampiran 18. Hasil Analisis Angket Tanggapan Siswa	231
Lampiran 19. Produk <i>Handout</i> Pasca Revisi	235
Lampiran 20. Dokumentasi Penelitian	236
Lampiran 21. Surat Bukti Penelitian	238

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Belajar merupakan hal yang sangat penting bagi setiap orang, dengan belajar seseorang dapat memahami dan menguasai sesuatu sehingga orang tersebut dapat meningkatkan kemampuannya. Menurut Suryani dan Agung, (2012:36) belajar adalah perubahan tingkah laku yang terjadi dari hasil latihan yang dilakukan secara sadar, bersifat fungsional, menetap, bersifat aktif dan positif berdasarkan atas latihan, bertujuan dan terarah serta mencakup keseluruhan aspek kepribadian.

Dalam kegiatan belajar-mengajar, siswa merupakan sebuah subjek dan objek dari kegiatan pembelajaran. Oleh karena itu inti dari kegiatan pembelajaran adalah kegiatan dalam mencapai tujuan pembelajaran. Tujuan pembelajaran akan dapat dicapai jika siswa berusaha secara aktif untuk mencapainya. Dalam rangka kegiatan pembelajaran merupakan sebuah sistem yang mengandung sejumlah komponen yang meliputi : tujuan, bahan pembelajaran, kegiatan belajar-mengajar, metode/strategi, media atau alat peraga, sumber dan evaluasi.

Bahan pelajaran merupakan substansi yang akan disampaikan dalam proses belajar-mengajar. Tanpa bahan pelajaran, proses belajar-mengajar tidak akan berjalan, oleh karena itu guru yang akan mengajar harus memiliki dan menguasai bahan pelajaran yang akan disampaikan kepada siswa (Suryani dan Agung, 2012:4

Selain bahan pelajaran, sumber pelajaran juga berperan aktif dalam keberhasilan proses belajar-mengajar. Menurut Kochhar, (2008:160) sumber pembelajaran adalah sarana pembelajaran dan pengajaran yang sangat penting yang menjadi sebuah keharusan bagi guru untuk mengeksploitasi berbagai macam sumber untuk mendapatkan alat bantu yang tepat untuk mengajar dan melengkapi yang telah tersedia dalam buku cetak, untuk menambah informasi, memperluas konsep dan membangkitkan minat siswa.

Menurut Sudjana dan Rivai, (2009:77) sumber belajar adalah segala daya yang dapat dimanfaatkan guna memberi kemudahan kepada seseorang dalam belajarnya. Menurut Suryani, (2012:44) sumber pembelajaran adalah bahan atau materi untuk menambah ilmu pengetahuan yang mengandung hal-hal baru bagi siswa. Jadi dari pernyataan diatas dapat peneliti simpulkan bahwa sumber pembelajaran adalah sebuah sarana yang digunakan oleh siswa dalam mencari dan menambah informasi yang dibutuhkan oleh siswa.

Permasalahan yang sering dihadapi guru dalam kegiatan pembelajaran adalah memilih dan menentukan materi pembelajaran atau bahan ajar yang sesuai dan bertujuan membantu peserta didik untuk mencapai kompetensi. Hal ini disebabkan oleh kenyataan bahwa dalam kurikulum atau silabus, materi ajar hanya dituliskan secara garis besar dalam bentuk “materi pokok”. Sementara itu, pada kenyataan di lapangan dapat dijumpai banyak pendidik yang masih menggunakan bahan ajar yang konvensional, yaitu bahan ajar yang sudah jadi dan tanpa ada upaya merencanakan, menyiapkan dan menyusun sendiri. (Prastowo, 2013: 18).

Peranan sumber belajar sangat penting, karena yang menentukan keberhasilan belajar adalah sumber belajar dan peserta didik bukan guru (Daryanto, 2010:65). Dari pernyataan diatas bahwa sumber belajar secara sistematis yang sudah dikelola dengan baik dapat menjadikan sebuah alternatif bagi siswa untuk menemukan informasi dalam kegiatan belajar. Banyak sekali metode pembelajaran yang dapat diterapkan oleh guru sejarah dalam kegiatan belajar mengajar di kelas guna membantu memberikan pemahaman fakta sejarah yang diajarkan pada peserta didik.

Menurut Prastowo, (2013: 30) menyebutkan bahwa sumber belajar dan bahan ajar memiliki makna yang berbeda. Sumber belajar adalah sesuatu (benda, data, fakta, dll) yang bisa menimbulkan proses belajar. Sedangkan bahan ajar merupakan segala bahan (baik informasi, alat maupun teks) yang disusun secara sistematis yang menampilkan sosok utuh dari kompetensi yang akan dikuasai peserta didik dan digunakan dalam proses pembelajaran.

Selama ini siswa hanya sebatas menerima informasi yang sudah disusun dalam buku teks dari pemerintah yang diajarkan melalui guru pengampu. Pola komunikasi dalam belajar sangat dipengaruhi oleh peranan sumber belajar yang digunakan dalam proses belajar. Peranan sumber belajar sangat penting karena yang menentukan keberhasilan belajar adalah sumber belajar dan peserta didik bukan guru (Daryanto, 2010:65).

Berdasarkan pengalaman peneliti selama menjalani Praktik Pengalaman Lapangan (PPL) pada tanggal 10 Agustus 2015 sampai 24 Oktober 2015 di SMP 2 Kendal menjumpai adanya permasalahan kaitanya dengan penyerapan

materi IPS Sejarah pada materi pokok kebijakan kolonial di Indonesia. Dapat diketahui bahwa hasil Ujian Tengah Semester matapelajaran IPS Sejarah hampir semua siswa kelas VIII tidak tuntas kompetensinya. Penulis melakukan observasi awal pada saat melaksanakan Praktik Pengalaman Lapangan guna mengetahui permasalahan apa yang terjadi pada peserta didik sehingga akar permasalahan dapat ditemukan dan teratasi.

Peneliti melakukan observasi awal dengan melakukan wawancara kepada guru mapel IPS Drs. Ahmad Su'udi dan mendapatkan hasil sebagai berikut: 1) Minat belajar siswa rendah karena mereka jarang membaca buku dipergustakaan. 2) Minat siswa terhadap pelajaran IPS cukup rendah dibuktikan dengan hasil ulangan harian. 3) Sumber belajar yang digunakan yang terbatas berupa buku paket siswa dan lembar kerja siswa yang kurang memuat informasi secara mendalam.

Disamping melakukan wawancara dengan guru mata pelajaran, peneliti juga melakukan wawancara terhadap beberapa siswa kelas VIII dari tiga kelas yang berbeda dan didapatkan hasil sebagai berikut: 1) Cara mengajar guru yang satu arah menjadikan siswa mengalami kebosanan. 2) Keterkaitan materi yang diajarkan dengan topik materi berbeda sehingga siswa sulit memahami materi. 3) Bahan ajar yang kurang memadai dengan hanya mengandalkan buku paket siswa dan lembar kerja siswa.

Dari hasil wawancara dengan siswa dan guru didapatkan informasi yang sama yaitu ketersediaan bahan ajar yang kurang memadai terkait materi kebijakan kolonial di Indonesia. Peneliti melakukan kunjungan ke

perpustakaan untuk mendalami bahan ajar yang digunakan baik oleh guru dan siswa yang digunakan dalam belajar-mengajar dikelas. Berdasarkan pengamatan di lapangan bahan ajar yang digunakan oleh siswa dan guru dalam kegiatan pembelajaran dikelas berupa buku ajar siswa kelas VIII kurikulum 2013 dan Latihan Kerja Siswa.

Berdasarkan hasil studi awal di SMP N 2 Kendal adanya potensi di perpustakaan yaitu terdapat buku teks sejarah yang lengkap antara lain buku Sejarah Nasional Indonesia (Kemunculan Penjajahan di Indonesia), Sejarah Indonesia (Zaman Kedatangan Kolonial Bangsa-bangsa Barat), Indonesia Dalam Arus Sejarah (Kolonisasi dan Perlawanan) dan beberapa buku sejarah yang menunjang dan dapat dijadikan sumber dalam belajar sejarah. Sementara itu, masalahnya adalah siswa kurang tertarik membaca buku dengan jumlah ketebalan yang banyak, bahasa yang sulit dipahami siswa dan sedikit memuat gambar.

Peneliti menyadari bahwa sementara ini di SMP N 2 Kendal belum adanya bahan ajar yang membahas tema-tema tertentu dalam pelajaran Ilmu Pengetahuan Sosial khususnya Sejarah. Oleh karenanya peneliti menyadari pentingnya upaya penyediaan bahan ajar yang layak bagi peserta didik, maka diperlukan pengembangan bahan ajar yang sesuai dengan kurikulum yang ada, namun tidak bersifat kaku, sehingga memudahkan peserta didik dalam belajar.

Berdasarkan potensi dan masalah yang ditemukan dilapangan, maka peneliti tertarik untuk mengembangkan bahan ajar berupa *handout* dengan

tema **Kebijakan Sistem Politik Kolonial Hindia Belanda tahun 1830-1920 di Indonesia.**

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang masalah diatas, rumusan masalah yang akan dikaji dalam penelitian ini adalah :

1. Bagaimanakah kondisi awal sumber belajar dilapangan sebelum dikembangkan bahan ajar ?
2. Bagaimanakah model pengembangan bahan ajar *handout* ?
3. Bagaimanakah kelayakan *handout* Kebijakan Sistem Politik Kolonial Hindia Belanda Tahun 1830- 1920 di Indonesia di lihat dari hasil validasi yang dilakukan oleh ahli materi dan media serta tanggapan Guru dan Siswa ?

C. Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah tersebut, tujuan yang ingin dicapai dari penelitian ini adalah :

1. Mendeskripsikan kondisi awal sumber belajar dilapangan sebelum dikembangkan bahan ajar
2. Menghasilkan dan menganalisis model pengembangan bahan ajar *handout*
3. Mengetahui dan menganalisis kelayakan *handout* Kebijakan Sistem Politik Kolonial Hindia- Belanda Tahun 1830- 1920 di Indonesia di lihat dari hasil validasi yang dilakukan oleh ahli materi dan media serta tanggapan Guru dan Siswa

D. Manfaat Penelitian

1. Manfaat Teoretis

Secara teoretis, penelitian ini diharapkan mampu memberikan suatu kajian yang ilmiah, kongkrit dan dapat dijadikan sebagai sumber referensi untuk penelitian lebih lanjut mengenai pengembangan bahan ajar Sejarah Kebijakan Sistem Politik Kolonial Hindia- Belanda Tahun 1830- 1920 di Indonesia Pada Siswa Kelas VIII SMP N 2 Kendal.

2. Manfaat Praktis

Secara praktis, penelitian ini diharapkan mampu memberikan suatu manfaat sebagai berikut :

a. Bagi peneliti

- 1) Meningkatkan kemampuan peneliti dalam menerapkan ilmu yang telah didapat dibangku kuliah
- 2) Menambah pengetahuan peneliti tentang kajian kegiatan penelitian
- 3) Meningkatkan kemampuan peneliti dalam hal penelitian kaitanya mengenai cara pembuatan handout yang dipraktikan dan dilakukan secara langsung

b. Bagi guru

- 1) Memperkaya sumber referensi guru dalam kegiatan belajar mengajar khususnya materi Sejarah Kebijakan Sistem Politik Kolonial Hindia- Belanda Tahun 1830-1920 di Indonesia sebagai alternatif pengajaran dikelas sehingga tidak terpaku pada buku ajar yang disediakan Pemerintah

- 2) Memberikan sumbangan informasi bagi guru IPS sejarah dalam rangka peningkatan kreativitas pengembangan bahan ajar Sejarah Indonesia
- c. Bagi peserta didik
- 1) Membantu peserta didik dalam memahami materi ajar kebijakan kolonial di Indonesia
 - 2) Memperkaya bahan ajar yang digunakan oleh peserta didik dalam kegiatan pembelajaran
- d. Bagi pihak sekolah
- 1) Meningkatkan kualitas pengajaran materi Sejarah yang termuat dalam Ilmu Pengetahuan Sosial (IPS) secara terpadu di sekolah
 - 2) Memberikan sumbangan yang positif bagi sekolah dalam usaha perbaikan proses pembelajaran untuk meningkatkan hasil belajar peserta didik.

E. Batasan Istilah

Agar tidak terjadi salah pengertian terhadap judul skripsi dan agar tidak meluas cakupannya, sehingga skripsi ini tetap pada pengertian yang dimaksudkan dalam judul, maka perlu adanya batasan istilah, yaitu :

1. Penelitian dan Pengembangan

Metode penelitian dan pengembangan atau dalam bahasa Inggrisnya *Research and Development* adalah metode penelitian yang digunakan untuk menghasilkan produk tertentu, dan menguji keefektifan produk tersebut (Sugiyono, 2010:407). Penelitian dan pengembangan yang

dimaksud dalam penelitian ini yaitu perluasan dan pendalaman materi pembelajaran yang menghasilkan produk bahan ajar yang berupa *handout*.

2. Bahan Ajar

Bahan ajar memiliki berbagai bentuk, dan salah satunya berbentuk bahan cetak (*printed*). Menurut Kemp dan Dayton dalam Prastowo, (2013:77) bahan ajar adalah sejumlah bahan yang disiapkan dalam kertas, yang dapat berfungsi untuk keperluan pembelajaran atau penyampaian informasi. Namun mengingat banyaknya ragam bentuk bahan ajar cetak, penulis dalam penelitian ini mengambil bentuk bahan ajar berupa *handout*.

3. Pembelajaran IPS Sejarah

Pembelajaran IPS sejarah menurut Aman, (2011:2) yaitu sebuah pembelajaran yang mengandung tugas menanamkan semangat berbangsa dan bertanah air. Menurut Agung dan Wahyuni, (2013:55) pembelajaran IPS sejarah adalah sebuah pembelajaran yang menanamkan pengetahuan, sikap, dan nilai-nilai mengenai proses perubahan dan perkembangan masyarakat Indonesia dan dunia dari masa lampau hingga kini.

4. Kebijakan Sistem Politik Kolonial Hindia Belanda tahun 1830-1920 di Indonesia

Kebijakan sistem politik kolonial Hindia Belanda tahun 1830-1920 yang dikembangkan oleh peneliti berupa : Sistem Politik Tanam Paksa, Sistem Politik Liberal dan Sistem Politik Etis. Menurut Suroyo, (2000:103) bahwa pelaksanaan sistem tanam paksa diakibatkan merosotnya keuangan pemerintah kolonial Hindia Belanda akibat

perlawanan daerah yaitu Perang Padri tahun 1815-1824 dan Perang Diponegoro tahun 1825-1830. Untuk mengatasi masalah keuangan tersebut maka negeri Belanda mengirim Gubernur Jenderal Van Den Bosch untuk memulihkan kondisi Hindia Belanda.

Van den Bosch mengeluarkan kebijakan berupa penanaman tanaman yang laku di ekspor berupa Tebu, Kopi, Nila/ Indigo, Tembakau dan sebagainya. Pemerintah Hindia Belanda mengerahkan para pejabat lokal seperti Bupati dan kepala desa untuk mengawasi dan mensukseskan kegiatan tanam paksa. Menurut Sukardi, (2014:36) diperkirakan keuntungan yang dihasilkan selama pelaksanaan Tanam Paksa pada tahun 1867 sekitar f. 784 Juta jumlah yang sangat besar pada masa itu mampu untuk melunasi hutang negeri Belanda dan memulihkan kondisi keuangan pemerintah Hindia Belanda.

Setelah adanya protes mengenai pelaksanaan sistem Tanam Paksa di negeri Belanda oleh kaum liberalis maka pada tahun 1870 dengan dikeluarkannya Undang-undang Agraria menandai berakhirnya sistem Tanam Paksa dan dimulainya sistem politik liberal/ politik pintu terbuka. Pemerintah Hindia Belanda memberikan kesempatan yang luas kepada pengusaha swasta asing dalam menjalankan usaha dalam sektor perkebunan tanaman yang laku keras dalam pasaran Internasional.

Banyak tanah milik penduduk pribumi yang disewakan kepada pengusaha asing yang mengakibatkan lahan yang semula ditanami tanaman pangan berganti menjadi tanaman perkebunan. Sehingga banyak

terjadi kelangkaan pangan diberbagai daerah meskipun ada, harganya tidak dapat terjangkau oleh penduduk pribumi.

Menjelang akhir tahun 1900 terjadi protes oleh Douwes Dekker dalam tulisanya berjudul "*Maxhavelaar*" dan Van Deventer yang mengutarakan penderitaan yang dialami oleh penduduk pribumi akibat dari pelaksanaan kebijakan kolonial dan hutang budi yang harus di bayar negeri Belanda kepada rakyat Indonesia, maka pada tahun 1900 pemerintah Hindia Belanda mengeluarkan kebijakan politik etis yaitu irigasi, edukasi dan emigrasi.

Kebijakan politik etis sejatinya sangat baik, akan tetapi dalam pelaksanaanya telah menyimpang dan tidak sesuai dengan tujuan awalnya. Diantaranya pembangunan saluran-saluran irigasi banyak digunakan dalam mengairi lahan perkebunan milik swasta asing maupun milik pemerintah Hindia Belanda. Adanya perbedaan yang mencolok dalam pelaksanaan pendidikan yang diterima penduduk pribumi dengan penduduk kelas atas. Penduduk pribumi hanya mengenyam pendidikan kelas 2 atau pendidikan rendah yang bertujuan untuk memenuhi akan kebutuhan pegawai rendah seperti mandor dan juru tulis.

Kepadatan jumlah penduduk di Pulau Jawa menjadikan pemerintah Hindia Belanda mengadakan transmigrasi. Akan tetapi pelaksanaan transmigrasi semata-mata hanya untuk memenuhi kebutuhan akan tenaga kerja yang murah dan melimpah di Pulau Jawa yang akan dikirim ke luar Jawa seperti Kalimantan dan Sumatera yang sedang mengembangkan

usaha pada sektor perkebunan. Menurut Cahyo (1995:14) sejatinya politik etis ini hanya membawa keuntungan bagi perkembangan Industri Kolonial Hindia Belanda semata, yaitu :

- a. Banyaknya Industri perkebunan yang berkembang dengan pesat yang menghendaki adanya saluran irigasi yang intensif, sehingga kebutuhan akan pengairan cukup besar diantaranya perkebunan tebu
- b. Jumlah pabrik-pabrik yang mengolah hasil perkebunan yang tersebar dipulau Jawa menyebabkan kebutuhan akan tenaga kerja baik berupa pegawai-pegawai rendahan/ mandor dan tenaga administrasi perkebunan maupun industri sangat besar
- c. Perkembangan Industri perkebunan-perkebunan diluar pulau Jawa yang sangat pesat mengakibatkan kebutuhan akan tenaga kerja disana besar pula, sehingga tenaga kerja yang murah dan berlimpah dipulau Jawa banyak dikirim keluar daerah dalam rangka pembukaan daerah baru untuk perkebunan modern.

Meskipun banyak beban berat dan penderitaan yang dialami oleh penduduk pribumi, pelaksanaan sistem politik kolonial juga membawa manfaat bagi rakyat pribumi diantaranya :

- a) Penduduk mengenal jenis-jenis tanaman ekspor dan cara penanamannya
- b) Meningkatnya jumlah uang yang beredar di masyarakat menjadikan perkembangan perdagangan dipedesaan
- c) Penyempurnaan infrastruktur berupa jembatan, jalan, rel kereta api, waduk dan saluran irigasi

- d) Munculnya tenaga kerja ahli dalam kegiatan non pertanian yang terkait dengan perkebunan dan industri pabrik di pedesaan

Sejatinya semua kebijakan politik kolonial sangat baik akan tetapi dalam pelaksanaannya di bawah terjadi banyak penyelewengan dan tidak sesuai dengan aturan yang telah disepakati. Rakyat pribumi mengalami beban berat baik yang diterima dari pejabat asing maupun para pejabat lokal seperti para Bupati dan kepala desa yang sering mengeluarkan kebijakan yang memberatkan penduduk pribumi.

Politik kolonial yang semula dimulai dengan penuh semangat pada kenyataannya pelaksanaan kebijakan ini mulai kabur dan semakin diragukan sehingga kebijakan politik etis dinilai gagal dalam meningkatkan kesejahteraan rakyat Indonesia.

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

A. Penelitian Terdahulu

Berdasarkan penelitian terdahulu supaya tidak terjadi penelitian yang sama dan bukan merupakan plagiatisme, penelitian pertama yaitu penelitian Ana Armawati (2012) yang berjudul “Pengembangan Materi Ajar Sejarah Pokok Bahasan Tanam Paksa Kelas XI IPS Semester II di SMA N 1 Gemuh Kabupaten Kendal”. Dalam penelitian tersebut mengupas kebijakan Tanam Paksa pada masa Kolonial Hindia Belanda. Dalam penelitian diatas didapat hasil bahwa pengembangan bahan ajar berupa *handout* sudah sesuai dengan standar pembuatan *handout* pembelajaran. Dalam penelitian diatas terdapat kontribusi bagi penelitian peneliti yaitu menjadikan rujukan bagi pengembangan materi terkait konten kebijakan kolonial. Perbedaan penelitian diatas dengan penelitian yang dikaji peneliti diatas hanya terbatas pada konteks tanam paksa dan dikembangkan untuk siswa Sekolah Menengah Atas.

Penelitian kedua dari Listya Septiwiharti (2015) yang berjudul “Pengembangan Bahan Ajar Berbentuk *Booklet* Sejarah Indonesia Pada Materi Pertempuran Lima Hari di Semarang Terhadap Minat Belajar Siswa Kelas XI IPS SMA N 1 Semarang Tahun Ajaran 2014/2015” menunjukkan hasil 84 % atau sangat baik. Dalam penelitian diatas terdapat kontribusi bagi penelitian peneliti yaitu menjadikan masukan bagi pengembangan peneliti selain *booklet*. Perbedaan penelitian diatas dengan penelitian yang dikaji

peneliti diatas hanya terbatas pada konteks tema yang dikaji dan sasaran penelitian.

Penelitian ketiga dari Virdia Apriliyani (2015) yang berjudul “Pengembangan Bahan Ajar Pembelajaran Sejarah Proses Islamisasi Berbasis Konservasi Terkait Dengan Kesadaran Sejarah di SMA 2 Kudus” menunjukkan bahwa hasil pengembangan mendapatkan hasil tingkat kesadaran sejarah terendah 80% dan tertinggi 94,8 %. Dalam penelitian diatas terdapat kontribusi bagi penelitian peneliti yaitu menjadikan masukan untuk mengembangkan materi selain masa islam. Perbedaan penelitian diatas dengan penelitian yang dikaji peneliti diatas adalah dalam penelitian diatas berbentuk modul dan sasaran penelitian pada siswa Sekolah Menengah Atas.

Penelitian keempat dari Fatimah Zahra (2014) yang berjudul “Pengembangan Bahan Ajar Sejarah Pokok Bahasan Islamisasi Berbasis Peninggalan Sejarah Masjid agung Demak Pada Siswa Kelas XI IPS SMA N 1 Dempet.” Penelitian tersebut menunjukkan hasil respon yang positif bagi siswa serta adanya peningkatan hasil kognitif. Dalam penelitian diatas terdapat kontribusi bagi penelitian peneliti yaitu menjadikan masukan bagi peneliti untuk mengembangkan bahan ajar selain masa islam. Perbedaan penelitian diatas dengan penelitian yang dikaji peneliti yaitu jenis bahan ajar diatas berupa modul dan sasaran penelitian tertuju pada siswa Sekolah Menengah Atas.

Penelitian kelima dari Ika Widya Kusumastuti (2015) yang berjudul “Pengembangan Bahan Ajar Sejarah Indonesia Materi Pokok Peristiwa

Rengasdengklok dan Perumusan Teks Proklamasi Kelas XI MIA Semester II di SMA N 1 Batang” menunjukkan hasil bahwa kelas yang menggunakan bahan ajar *handout* mendapat nilai yang lebih baik dibanding dengan kelas yang tidak menggunakan sehingga penggunaan *handout* memberi pengaruh cukup berarti dan berpengaruh positif terhadap keefektifan penggunaannya. Dalam penelitian diatas terdapat kontribusi bagi penelitian peneliti yaitu sebagai rujukan bagi pengembangan materi selain masa kemerdekaan. Perbedaan penelitian diatas dengan penelitian yang dikaji peneliti yaitu pada tema yang dikembangkan dan sasaran penelitian yaitu siswa Sekolah Menengah Atas.

Peneliti melakukan pengembangan bahan ajar berupa *handout* tidak semata mengulas kebijakan Tanam paksa, melainkan kebijakan sistem politik kolonial Hindia Belanda tahun 1830-1920 di Indonesia. Pada penelitian tersebut dilakukan penelitian pada SMP N 2 Kendal. Sehingga dengan adanya penelitian terdahulu dapat memberikan wawasan dalam melakukan pengembangan materi kebijakan kolonial di Indonesia.

B. Landasan Teori

1. Bahan Ajar

Bahan ajar menurut Prastowo, (2015:17) yaitu segala bahan (baik informasi, alat maupun teks) yang disusun secara sistematis yang menampilkan sosok utuh dari kompetensi yang akan dikuasai peserta didik dan digunakan dalam proses pembelajaran dengan tujuan perencanaan dan penelaahan implementasi pembelajaran.

Menurut Majid, (2009:173) mengungkapkan bahwa bahan ajar adalah segala bentuk bahan yang digunakan untuk membantu guru atau instruktur dalam melaksanakan kegiatan belajar mengajar di kelas. Dari pendapat para ahli diatas, penulis dapat simpulkan bahwa bahan ajar yaitu seperangkat materi ajar yang sudah dipersiapkan secara matang baik berupa teks maupun non-teks yang digunakan dalam kegiatan pembelajaran.

Dengan bahan ajar memungkinkan siswa dapat mempelajari suatu kompetensi atau kompetensi dasar yang runtut dan sistematis sehingga secara akumulatif mampu menguasai semua kompetensi secara utuh dan terpadu. Dalam Prastowo, (2015:28) bahan ajar paling tidak mencakup antara lain :

- a. Petunjuk belajar
- b. Kompetensi yang akan dicapai
- c. Informasi pendukung
- d. Latihan-latihan
- e. Petunjuk kerja, dapat berupa Lembar Kerja (LK)
- f. Evaluasi

Bahan Ajar menurut bentuknya dikelompokkan menjadi empat yaitu :

- a. Bahan cetak (*printed*)
- b. Bahan ajar dengar (*audio*)
- c. Bahan ajar pandang dengar (*audio visual*)
- d. Bahan ajar interaktif (*interactive teaching material*)

Dalam kegiatan pembelajaran bahan ajar mempunyai dua fungsi yaitu untuk pendidik dan peserta didik antara lain:

a. Fungsi bahan ajar bagi pendidik yaitu:

- 1) Menghemat waktu pendidik dalam mengajar
- 2) Mengubah peran pendidik dari seorang pengajar menjadi seorang fasilitator
- 3) Meningkatkan proses pembelajaran menjadi lebih efektif dan interaktif
- 4) Sebagai pedoman bagi pendidik yang akan mengarahkan semua aktivitasnya dalam proses pembelajaran dan merupakan substansi kompetensi yang semestinya diajarkan kepada peserta didik
- 5) Sebagai alat evaluasi pencapaian atau penguasaan hasil pembelajaran

b. Fungsi bahan ajar bagi peserta didik yaitu:

- 1) Peserta didik dapat belajar tanpa harus ada pendidik atau teman peserta didik lainnya
- 2) Peserta didik dapat belajar kapan saja dan dimana saja ia kehendaki
- 3) Peserta didik dapat belajar sesuai kecepatannya masing-masing
- 4) Peserta didik dapat belajar menurut aturan yang dipilihnya sendiri
- 5) Membantu potensi peserta didik untuk menjadi pelajar yang mandiri
- 6) Sebagai pedoman bagi peserta didik yang akan mengarahkan semua aktivitasnya dalam proses pembelajaran dan merupakan substansi kompetensi yang seharusnya dipelajari atau dikuasainya

Dalam penelitian ini, penulis mengambil jenis bahan ajar cetak (printed) yaitu berupa *handout*.

a. *Handout*

Menurut Majid, (2009:175) *handout* yaitu bahan tertulis yang disiapkan oleh seorang guru untuk memperkaya pengetahuan peserta didik. *Handout* biasanya diambilkan dari beberapa literatur yang memiliki relevansi dengan materi yang diajarkan atau kompetensi dasar dan materi pokok yang harus dikuasai oleh peserta didik. Sementara itu, Prastowo (2013:79) mamaknai *handout* sebagai bahan pembelajaran yang sangat ringkas. Bahan ajar ini diberikan kepada peserta didik guna memudahkan mereka saat mengikuti proses pembelajaran.

Dari pengertian para ahli diatas dapat peneliti simpulkan *handout* merupakan bahan pembelajaran yang dibuat oleh pendidik yang didapat dari berbagai sumber yang disusun secara ringkas dan mudah dipahami. Berdasarkan penjelasan pengertian *handout* yang telah dikemukakan, dapat kita pahami bahwa *handout* memiliki arti penting dalam kegiatan pembelajaran. Secara lebih terperinci, berikut dipaparkan mengenai fungsi, tujuan, cakupan *handout*, serta langkah-langkah penyusunan *handout*.

1) Fungsi *Handout*

Menurut Steffen dan Peter Ball dalam Prastowo, (2013:80) menjelaskan fungsi *handout* antara lain:

- a) Membantu peserta didik agar tidak perlu mencatat

- b) Sebagai pendamping penjelasan pendidik
- c) Sebagai bahan rujukan peserta didik
- d) Memotivasi peserta didik agar lebih giat belajar
- e) Peningat pokok-pokok materi yang diajarkan
- f) Memberi umpan balik
- g) Menilai hasil belajar

2) Tujuan Pembuatan *Handout*

Dalam fungsi pembelajaran, pembuatan *handout* menurut Bellawati dalam Prastowo, (2013:80-81) memiliki beberapa tujuan yaitu:

- a) Untuk memperlancar dan memberikan bantuan informasi atau materi pembelajaran sebagai pegangan bagi peserta didik
- b) Untuk memperkaya pengetahuan peserta didik
- c) Untuk mendukung bahan ajar lainnya atau penjelasan dari pendidik

3) Cakupan *Handout*

Sebuah *handout* seyogyanya mencakup beberapa unsur yang harus ada. Unsur-unsur dari *handout* ini disebut juga sebagai struktur *handout*. Unsur-unsur ini harus kita pahami dan ketahui untuk bisa membuat *handout* yang benar. *Handout* sebagai salah satu bentuk bahan ajar memiliki struktur yang terdiri atas dua

unsur/ komponen. Adapun kedua unsur tersebut adalah sebagai berikut:

- a) Identitas *handout*, unsur ini terdiri dari atas nama sekolah, kelas, nama mata pelajaran, standar kompetensi, kompetensi dasar, indikator pembelajaran, tujuan yang akan dicapai, serta petunjuk pembelajaran
- b) Materi pokok atau materi pendukung pembelajaran yang akan disampaikan, yang perlu kita perhatikan dalam hal ini adalah kepedulian, kemauan dan keterampilan pendidik dalam menyajikan materi.

4) Langkah-Langkah Penyusunan *Handout*

Dalam penyusunan *handout*, maka *handout* tersebut paling tidak harus mengandung beberapa komponen. Selaras dengan penjelasan sebelumnya bahwa *handout* dibuat atas dasar kompetensi dasar yang harus dicapai oleh peserta didik, maka penyusunan *handout* harus diturunkan dari kurikulum. Menurut Prastowo, (2013:86-91) langkah-langkah penyusunan *handout* sebagai berikut:

- a) Melakukan analisis kurikulum
- b) Menentukan judul *handout* dan disesuaikan dengan kompetensi dasar serta materi pokok yang akan dicapai. Pada tahap ini dilakukan dengan berdasarkan hasil penyusunan peta bahan ajar yang telah dibuat

- c) Mengumpulkan referensi yang relevan dengan materi pokoknya sebagai bahan tulisan
- d) Mengusahakan agar kalimat yang digunakan tidak terlalu panjang, namun sudah mampu menjelaskan secara mendalam informasi yang ingin disampaikan kepada peserta didik
- e) Menggunakan grafis dan gambar dalam pengembangan *handout* dengan tujuan melalui gambar, dapat memudahkan orang menerima pesan yang disampaikan
- f) Mengevaluasi hasil tulisan dengan cara dibaca ulang. Bila perlu, meminta orang lain membaca terlebih dahulu untuk mendapatkan masukan
- g) Memperbaiki *handout* sesuai dengan kekurangan-kekurangan yang ditemukan

2. Kebijakan Sistem Politik Kolonial Hindia Belanda Tahun 1830-1920 di Indonesia

Kebijakan sistem politik kolonial di Indonesia tidak lepas dari proses kegiatan kolonialisme Belanda di Indonesia yang bertujuan untuk mendapatkan keuntungan yang sebesar-besarnya bagi negeri Belanda. Menurut Loomba, (2016:3) kolonialisme merupakan sebuah kegiatan penaklukan dan penguasaan atas tanah dan benda yang dimiliki rakyat. Pada tahun 1830 dimulailah masa penjajahan yang sebenarnya dalam sejarah Jawa. Menurut Cahyo, (1995:2) kolonialisme yaitu suatu

rangkaian daya upaya suatu bangsa untuk menaklukkan bangsa lain dalam segala aspek lapangan.

Dari pendapat diatas dapat peneliti simpulkan bahwa kolonialisme yaitu sebuah paham dimana kegiatan untuk menguasai atau menduduki suatu wilayah atau negara tertentu untuk mendapatkan keuntungan sebesar-besarnya bagi negara penakluk. Istilah kolonialisme pada umumnya disamakan dengan imperialisme, walaupun keduanya secara etimologis berbeda akan tetapi dalam pelaksanaanya dirasakan sama yang melahirkan suatu sistem penjajahan di daerah baru yang mengakibatkan penderitaan dan rasa tidak puas dari bangsa yang dijajah. Kolonialisme dipandang sebagai sistem yang merajai atau mengendalikan ekonomi atas negeri bangsa lain. Atas dasar itulah maka bangsa Eropa keluar dari negerinya berkelana mengarungi samudera untuk mencari daerah-daerah yang akan dijadikan taklukannya.

Pada negeri yang menjadi kekuasaanya, kolonialisme menerpakan tindakan-tindakan yang meliputi bidang politik, ekonomi, sosial dan budaya yang sangat merugikan bangsa yang dijajahnya. Pada bidang politik penjajah melakukann dominasi politik yaitu kekuasaan pemerintah berada ditangan kaum penjajah. Pada bidang ekonomi penjajah melakukan eksploitasi ekonomi yang mengambil dan mengangkut kekayaan dari negeri jajahan menuju negeri penjajah. Pada bidang kebudayaan penjajah melakukan penekanan kebudayaan dengan berbagai cara baik halus maupun kasar sehingga sangat merugikan kebudayaan bangsa yang

dijajah. Dan pada bidang sosial penjajah menciptakan diskriminasi sosial yang menempatkan bangsa penjajah pada kedudukan lebih tinggi dibanding dengan bangsa yang terjajah yang dianggap kelas rendah (Cahyo, 1995:2-3).

Dalam kajian ini peneliti merumuskan tentang kebijakan politik kolonial Hindia Belanda tahun 1830-1920 di Indonesia yang terbagi dalam tiga kebijakan politik diantaranya kebijakan sistem politik tanam paksa, kebijakan sistem politik liberal/ pintu terbuka dan kebijakan sistem politik etis yang dijabarkan sebagai berikut :

a. Kebijakan Sistem Politik Tanam Paksa (*Cultuurstelsel*)

Sejak abad XIX pemerintah Kolonial Belanda sebagai pemegang kekuasaan di Indonesia menjadikan sektor perkebunan sebagai pemegang peran penting dalam eksploitasi pedesaan. Setelah diadakan perjanjian Wina (1815) maka kekuasaan wilayah Jawa diserahkan kepada pemerintah Hindia Belanda. Kekuasaan Hindia Belanda menjadi daerah yang menguntungkan bagi negara Induk (Sudaryanto dkk, 2007:35).

Pada tahun yang penuh dengan ketidakpastian, telah terjadi pemberontakan besar yang menentang penjajahan barat. Pada tahun 1815-1824 meletus perang Padri, tahun 1825-1830 terjadi perang Diponegoro dan pada tahun 1830-1821 terjadi perang melawan Belgia di negeri Belanda. Perang ini menelan korban sekitar 200.000

orang meninggal dunia dan pemerintah Hindia Belanda menanggung hutang sebesar f 32.000.000 (Suroyo, 2000:103).

Pemerintah Hindia Belanda mengalami defisit keuangan yang disebabkan pembiayaan perang, untuk mengatasi masalah tersebut negeri Belanda mengirim Gubernur Jenderal baru yaitu Johannes Van Den Bosch untuk menerapkan *Cultuurstelsel* dengan harapan supaya memperoleh keuntungan-keuntungan besar dari daerah koloninya.

Menurut Van Niel, (2003:3) sewa tanah pertama kali diperkenalkan di Jawa pada masa pemerintahan peralihan Inggris (1811-1816) oleh Sir Thomas Stamford Raffles yang banyak menghimpun gagasan sewa tanah dari sistem pendapatan tanah India-Inggris. Sewa tanah didasarkan pada pemikiran pokok mengenai hak penguasa sebagai pemilik semua tanah yang ada.

Kegagalan Raffles menerapkan *landrent* mengilhami Gubernur Jenderal Van Den Bosch menerapkan Sistem Tanam Paksa pada tahun 1830. Konsep ini memang sangat jitu untuk mengeksplotasi ekonomi yang maksimal dalam kondisi sosial ekonomi Jawa dengan memadukan unsur-unsur tradisional, yaitu menguasai tanah dan tenaga kerja lewat para penguasa pribumi dengan menggunakan paksaan untuk menanam tanaman ekspor kepada rakyat petani Jawa. Serta memadukan unsur-unsur modern yaitu manajemen produksi dan pemasaran di bawah monopoli pemerintah Kolonial (Suroyo, 2000:8).

Van Den Bosch mengatakan bahwa Pemerintah Hindia Belanda harus memberlakukan kembali penyerahan paksa dimana sistem yang pernah dilaksanakan oleh VOC. Rakyat pribumi diwajibkan menyerahkan "*Landrent*" bukan dalam bentuk uang, melainkan dalam bentuk penyerahan tenaga kerja untuk penanaman tanaman tertentu yang akan di ekspor ke pasaran Eropa. Penyerahan pajak dalam bentuk "*In Natura*" yang terkumpul dari penyerahan hasil pertanian oleh para petani yang besar, diharapkan dapat dijual dan dikirim ke Eropa dan Amerika (Daliman, 2012:32).

Van Den Bosch ingin menjadikan Jawa sebagai aset yang menguntungkan tanah airnya yaitu negeri Belanda dalam tempo sesingkat mungkin dan menghasilkan komoditas pertanian tropis terutama kopi, gula dan nila/ indigo (Van Niel, 2003:6). Sistem ini memungkinkan adanya eksploitasi pedesaan Jawa secara maksimal dan membuktikan bahwa daerah koloni dapat memberikan pemasukan besar bagi negeri Induk.

Dalam rangka melaksanakan kebijakan Tanam Paksa, setiap desa harus menyerahkan seperlima dari lahan subur untuk pemerintah.

Pemerintah Hindia Belanda berhasil mengerahkan para Bupati Jawa dengan memberikan bonus dan insentif untuk mengawasi penanaman, panen dan pengangkutan dari sistem Tanam Paksa.

Bagi mereka yang tidak mempunyai tanah maka diberikan kewajiban untuk bekerja selama 75 hari dalam setahun pada kebun-

kebun milik pemerintahan sebagai pengganti pajak yang ditanggungnya. Pada prakteknya peraturan itu tidak berfungsi, karena seluruh wilayah pertanian wajib ditanami tanaman ekspor dan hasilnya diserahkan kepada pemerintah Hindia Belanda (Hermawati, 2013:65).

Menurut Ricklefs (1998:183) pelaksanaan Sistem Tanam Paksa didasarkan pada suatu prinsip umum yang sederhana. Desa-desa di Jawa mempunyai hutang pajak tanah kepada pemerintah kolonial Hindia Belanda yang biasanya dihitung berdasarkan 40 persen dari hasil panen utama desa yaitu berupa beras. Karena kurang tersedianya sumber daya administrasi ditambah dengan adanya kekurangan mata uang maka Van Den Bosch merencanakan bahwa setiap desa harus menyisihkan sebagian tanahnya guna ditanami tanaman ekspor (tebu, kopi dan nila/ indigo).

Daerah yang mendapat perhatian pertama dalam pelaksanaan Tanam Paksa yaitu Parahyangan (Jawa Barat) dengan melakukan penanaman indigo/ nila. Kemudian Cirebon, Tegal dan Pekalongan melaksanakan penanaman tebu dan indigo hingga pada tahun 1830 Gubernur Jenderal mengeluarkan peraturan dimana wilayah seluruh Karesidenan Jawa harus ditanami tebu.

Dalam rangka melaksanakan Sistem Tanam Paksa, pemerintah Kolonial Hindia Belanda perlu memperoleh lahan pertanian untuk ditanami tanaman wajib perkebunan. Menurut Sukardi (2014:61)

untuk mendapatkan lahan pertanian yang akan ditanami tanaman wajib perkebunan maka pihak kolonial tidak berhubungan secara langsung dengan penduduk, melainkan melalui perantara pejabat pribumi seperti Bupati, kepala distrik, kepala desa yang terlibat secara langsung dan bertanggung jawab terhadap kelancaran pelaksanaan Sistem Tanam Paksa.

Mengenai pengawasan sistem tanam paksa merupakan tanggung jawab dari para pejabat kolonial diantaranya residen, asisten residen, kontrolir dan para direktur penanaman. Sistem tanam paksa merupakan cara pungutan pajak yang tidak berlainan dari cara lama dalam zaman VOC. Tanam paksa merupakan aturan yang memerintahkan kepada bangsa Indonesia di beberapa daerah untuk menanam sebagian dari tanahnya dengan tanaman yang laku dijual di pasaran Eropa, misalnya kopi, gula, tarum dan sebagainya. Hasil dari tanam paksa harus diserahkan kepada pemerintah. Aturan ini mulai berjalan pada tahun 1830 khususnya di daerah pulau Jawa (Anshoriy, 2008: 84).

Tabel 1. Jenis tanaman pada masa Tanam Paksa dan Luas lahan

Jenis Tanaman Ekspor	Luas Lahan
Gula	32,722 bahu
Indigo/ Nila	22,141 bahu
Teh	324 bahu
Tembakau	268 bahu
Kayu Manis	30 bahu
Kapas	5 bahu

Sumber: Sondarika, (2014:62) dalam Jurnal Artefak

Dengan sistem Tanam Paksa, Bosch merencanakan bahwa desa harus menyisihkan sebagian tanahnya untuk ditanamai komoditas ekspor (khususnya kopi, tebu dan nila). Hasil komoditi tersebut selanjutnya harus dijual kepada pemerintah Kolonial Hindia Belanda dengan harga yang sudah ditentukan. Melalui sistem ini Bosch berpendapat bahwa kas negeri Belanda akan meningkat dan hutang-hutang dapat dilunasi. Negeri jajahan dipakai sebagai tempat untuk mengambil keuntungan bagi negeri Induk (Wasino, 2008:27-28).

Untuk penanaman tebu membutuhkan tanah persawahan yang baik dengan saluran irigasi yang lancar, untuk penanaman kopi membutuhkan jenis tanah agak tandus. Selama tahun 1830-1840 seluruh wilayah Karesidenan di Jawa sudah terserap oleh kegiatan Tanam Paksa. Produksi tanaman kopi terbesar berasal dari Priyangan (Jawa Barat), Kedu (Jawa Tengah), Pasuruan dan Besuki (Jawa Timur).

Untuk penanaman Tebu banyak terdapat di daerah Karesidenan Jepara, Semarang, Pekalongan, Tegal (Jawa Tengah) dan Cirebon (Jawa Barat). Untuk jenis tanaman Indigo/Nila banyak terdapat di daerah Bagelan dan Banyumas (Jawa Tengah) dan sedikit di daerah Pekalongan dan Cirebon. Jenis tanaman tembakau banyak dijumpai di daerah Rembang dan Pacitan. Sedangkan jenis tanaman kayu manis banyak ditanam di daerah Karawang (Jawa Barat) (Hermawati, 2013:67).

Dalam Pelaksanaan sistem Tanam Paksa terdapat beberapa aturan bahwa pungutan kepada rakyat tidak dalam bentuk uang, melainkan berupa hasil tanaman yang dapat di ekspor. Seperlima dari tanah garapan yang ditanami padi oleh rakyat desa wajib ditanami tanaman tertentu dengan menggunakan tenaga yang tidak melebihi tenaga untuk menggarap penanaman padi. Tanah yang dipakai untuk Tanam Paksa terhindar dari membayar pajak tanah, untuk kelebihan hasil penjualan yang melebihi nilai pajak tanahnya maka akan dikembalikan kepada desa. Namun jika terjadi kegagalan panen, maka beban tanggung jawabnya berada ditangan Pemerintah.

Dalam kegiatan pengolahan hasil tanaman untuk ekspor seperti tebu dikerahkan tenaga rakyat, mulai dari penanaman hingga pengangkutan ke pabrik. Rakyat yang dikerahkan itu akan mendapat kebebasan dari pajak tanah pada saat tanaman siap untuk dipanen. Menurut Van Den Bosch penduduk Jawa dipaksa dengan aturan untuk

menanami seperlima dari tanahnya dengan tanaman-tanaman yang ditetapkan jenisnya oleh Pemerintah Hindia Belanda yaitu kopi, tebu, kapas dan tarum. Orang yang tidak mempunyai tanah maka mereka harus bekerja rodi selama 86 hari dalam setahun yang setara dengan 1/5 tahun.

Dalam kaitanya dengan kerja wajib tradisional, para petani di mobilisasi besar-besaran oleh para penguasa pribumi mereka sendiri atas perintah pemerintah Hindia Belanda. Mereka bekerja paksa menanam tanaman ekspor, membangun jembatan, jalan dan memelihara sarana dan prasarana pendukungnya. Serta segala hal yang berkaitan dengan Tanam Paksa yang menghendaki peningkatan kerja wajib secara besar-besaran (Suroyo, 2000:8).

Dengan diterapkan sistem tanam paksa banyak tanah pedesaan yang disewa dalam rangka perluasan perkebunan. Dengan demikian penguasaan hak tanah dan tenaga kerja yang semula dalam tatanan tradisional beralih kepada perusahaan perkebunan. Dengan demikian pedesaan di Indonesia yang berbasis agraris yang semula menghasilkan bahan pangan untuk kebutuhan sendiri dalam perkembangannya juga harus mencukupi kebutuhan dunia Internasional melalui hasil-hasil perkebunan.

Menurut Suroyo, (2000:4) bahwa eksploitasi kolonial dilakukan melalui penguasaan tanah dan tenaga kerja rakyat dengan berbagai kerja wajib. Bila dicermati eksploitasi kolonial sebenarnya lebih

banyak bertumpu pada eksploitasi tenaga kerja. Pada tahun 1840 tanah pertanian di Jawa yang di pakai untuk Tanam Paksa sekitar 6% (tidak termasuk tanam paksa kopi), padahal penduduk petani pelaksana kerja wajib tanam mencapai 72,5 % dari seluruh penduduk petani di Jawa.

Dalam pelaksanaan *cultuurstelsel* pihak kolonial Hindia Belanda berusaha agar tidak berhubungan secara langsung kepada petani, sehingga dalam penyelenggaraanya diserahkan kepada para Bupati dan Kepala Desa beserta masyarakat desa itu sendiri (Hermawati, 2013:68). Para Kepala Desa mengumpulkan dan menyediakan tenaga kerja murah untuk kepentingan penyediaan tenaga kerja yang banyak dalam sektor penanaman ekspor. Para Kepala Desa membangun dan memperluas kekuasaan mereka sehingga mereka dapat mempertahankan ikatan-ikatan tradisional dalam mensukseskan kebijakan Tanam Paksa (Zulkarnain, 2011:79).

Selain dikenai dengan penanaman tanaman wajib, penduduk desa juga dikenakan dalam penyediaan tenaga kerja paksa yang terbagi atas tiga macam, yaitu: Kerja wajib umum seperti pembuatan jalan, jembatan, sarana transportasi dalam mendukung Tanam Paksa; kerja wajib panen seperti pengangkutan hasil perkebunan menuju pabrik-pabrik; serta kerja wajib garap penanaman. Pelaksanaan sistem kerja paksa didukung oleh keberadaan pejabat lokal seperti Bupati dan kepala desa sebagai perantara, sehingga mereka secara langsung

mengatur penggunaan tanah dan tenaga kerja dipedasaan untuk kepentingan kolonial.

Disamping itu kepala-kepala pribumi tidak jarang melakukan pungutan dan beban kerja wajib kepada para petani pedesaan di luar batas kewenangannya. Akibatnya rakyat pedesaan semakin menderita berkenaan dengan hutang-hutang yang ditanggungnya akibat pungutan atas penghasilan petani oleh tuan tanah, pejabat pribumi dan lintah darat.

Antara teori dan praktek dalam pelaksanaan sistem tanam paksa tidak selalu sama. Pelaksanaan tanam paksa pada daerah satu dengan daerah lain terdapat perbedaan. Sistem tanam paksa berubah menjadi bagian dari kisah-kisah pemerasan yang lebih besar dalam sejarah penjajahan. Para pejabat lokal, maupun pejabat yang berkebangsaan Belanda sering melakukan pemerasan dengan memberikan taksiran pajak tanah maupun banyaknya komoditi ekspor bagi setiap desa lebih besar, sehingga mereka memperoleh keuntungan yang lebih dan masuk pada kantong pribadinya.

Menurut Wasino (2008:29) dampak dari sistem tanam paksa bagi orang Jawa dan orang Sunda sangat beragam. Bagi kalangan bangsawan, masa tanam paksa merupakan masa dimana sangat menguntungkan kedudukan mereka menjadi lebih aman, dan terdapat aturan bahwa mereka akan memperoleh jabatan dengan secara turun temurun. Pejabat lokal memperoleh hasil keuntungan yang besar dari

penyerahan wajib tanam yang mereka kelola. Karena sikap ketergantungan yang sangat kuat terhadap pemerintah Hindia Belanda, maka mereka melakukan pemaksaan kepada para petani. Mereka menjadi sasaran pengawasan dan campur tangan para pejabat Hindia Belanda.

Menurut Zulkarnain, (2011:37) bahwa sistem Tanam Paksa banyak mengalami penyimpangan yang serius. Penyimpangan tersebut disebabkan oleh adanya *cultur-procenten* sehingga para pengawas Tanam Paksa yang menyetorkan hasil tanaman wajib akan mendapatkan imbalan. Kegiatan ini menjadikan para pengawas berusaha menyetorkan hasil produksi sebanyak-banyaknya dengan memeras para petani. Para Kepala Desa juga mengeluarkan kebijakan yang tidak kalah beratnya bagi para petani. Mereka menjadi kaki tangan pemerintah Kolonial yang banyak mengeluarkan aturan seenaknya sendiri yang menentukan luas lahan petani yang akan digunakan untuk penanaman wajib, jumlah penduduk yang harus bekerja sebagai buruh dan menetapkan hasil produksi yang harus dibayar oleh para petani.

Menurut Sukardi, (2014:39) bahwa sistem tanam paksa telah membawa penderitaan bagi rakyat Indonesia, karena beratnya beban hidup dan kurangnya bahan makanan serta gizi mereka. Peningkatan jumlah produksi pertanian ekspor tidak di ikuti dengan peningkatan jumlah produksi pangan. Persediaan kebutuhan pokok seperti beras,

palawija dan lainnya mengalami penurunan drastis. Harga beras yang mahal menunjukkan bahwa telah terjadi kelangkaan beras pada masa itu. Hal ini disebabkan banyaknya tenaga kerja para petani yang diserap oleh kegiatan Tanam Paksa sehingga lahan pertanian mereka yang biasa ditanami tanaman pangan tergantikan oleh tanaman ekspor.

Sistem Tanam Paksa yang dipandang membawa keuntungan besar bagi negeri Belanda ternyata menimbulkan berbagai masalah. Adanya penderitaan yang dialami rakyat khususnya di daerah penanaman tebu. Sebagai contoh daerah Pekalongan tingkat kesuburan tanah terkuras untuk penanam tebu, sehingga serangkaian penanaman padi terganggu. Akibatnya terjadi kekurangan beras, harga beras mengalami kenaikan pada tahun 1830-1840. Hal ini diperburuk adanya bencana kelaparan di berbagai daerah antara lain pada tahun 1844 terjadi bencana kelaparan di Cirebon, muncul wabah penyakit karena gizi dan kelaparan yang diderita oleh penduduk pribumi.

Tekanan paling berat yang dirasakan oleh para petani di daerah Priyangan (Jawa Barat). Mereka dipaksa melakukan pekerjaan menanam tanaman Indigo (Nila). Orang laki-laki diwajibkan bekerja selama 7 bulan dan jauh dari rumah mereka. Lahan mereka menjadi tidak terurus karena tenaga mereka tercurahkan untuk kerja wajib diperkebunan. Disisi lain mengenai masalah pajak, tanah yang digunakan untuk tanam paksa tidak akan dikenai pajak, akan tetapi

pada praktiknya para petani menanggung dua beban besar yaitu: menyerahkan tenaganya untuk menanam tanaman ekspor, dan membayar pajak tanah (Marwati, 1993:105).

Tanam Paksa membuat penduduk Jawa mengalami penderitaan yang berat dikarenakan :

- 1) Rakyat Jawa dipaksa untuk menanam tanaman yang belum diketahui sebelumnya, sehingga mereka tidak sempat memelihara tanamannya sendiri. Sebab, jika mereka meninggalkan pekerjaannya untuk kepentingan tanam paksa, maka para sinder Belanda dan para mandor *Inlander* akan melakukan kekerasan kepada pribumi.
- 2) Hasil pengupahan dari kerja paksa sangatlah sedikit sehingga tidak mencukupi untuk kebutuhan sehari-hari.

Dampak dari sistem tanam paksa yang dirasakan oleh para petani sulit untuk digeneralisasikan, dimana masa itu dikatakan sebagai masa sulit. Penanaman tebu dan Nila di daerah persawahan telah mengambil lahan, tenaga kerja dan air dari penanaman padi sehingga merugikan penduduk setempat. Disisi lain industri perkebunan ini memberikan kesempatan penduduk desa untuk menjadi karyawan upahan dan menguntungkan bagi mereka.

Meskipun terlihat beberapa keuntungan yang diperoleh dari sistem tanam paksa khususnya pasca tahun 1840, terdapat beban yang sangat serius yang menimpa penduduk lokal setempat. Adanya ketidakmerataan dalam pembagian pendapatan para penduduk desa.

Para pejabat desa dan para pengusaha menikmati keuntungan yang sangat besar dari penerapan sistem ini.

Dalam rangka menentang kebijakan tanam paksa, Pada tahun 1860 Eduard Douwes Dekker menerbitkan karyanya yang berjudul “*Max Havelaar*” dengan samaran Multatuli. Douwes Dekker merupakan seorang pejabat pada administrasi Kolonial yang bertugas sebagai asisten residen di Jawa Barat. Karya Dekker merupakan kritikan terhadap kebijakan politik tanam paksa pemerintah Hindia Belanda yang tertuang dalam bentuk sastra. Secara tidak langsung kritikan ini menjadikan kaum liberal yang hendak melakukan usaha swasta kedalam pemerintah kolonial Hindia Belanda berfikir untuk menghentikan tanam paksa (Vlekke, 2010:342).

Buku ini mengungkapkan dengan sangat jelas dan rinci mengenai keadaan pemerintah Kolonial Hindia Belanda yang buruk dan korup di Jawa. Buku ini menjadi sebuah senjata ampuh dalam menentang kegiatan tanam paksa dan penjajahan di Jawa. Perdebatan politik di negeri Belanda membawa pengaruh dengan dihapusnya sistem tanam paksa secara bertahap di Jawa.

Penghapusan peranan pemerintah dalam eksploitasi ekonomi di Jawa dimulai dari tanaman yang tidak mendatangkan keuntungan hingga tanaman yang membawa keuntungan. Penghapusan dimulai dari eksploitasi lada (1862), cengkih dan Pala (1860), nila, teh dan kayu manis (1865) dan tembakau (1866). Dan yang terakhir yaitu kopi dan

gula merupakan tanaman yang paling menguntungkan untuk dihapus terakhir kali (Wasino, 2008:30-31).

Menurut Sondarika, (2014:65) Selain beban berat yang dialami oleh penduduk pribumi, sistem Tanam Paksa juga membawa dampak positif bagi kemajuan rakyat Indonesia diantaranya :

- 1) Meningkatnya jumlah uang yang beredar di masyarakat pedesaan sehingga memberikan rangsangan bagi perkembangan perdagangan
- 2) Penyempurnaan infrastruktur dalam proses tanam paksa diantaranya pembangunan saluran pengairan, jembatan, pelebaran jalan, pembangunan rel kereta api, dan penyempurnaan fasilitas pelabuhan, pabrik dan gudang untuk menampung hasil tanaman perkebunan
- 3) Munculnya tenaga kerja ahli dalam kegiatan non pertanian yang terkait dengan perkebunan dan industri pabrik di pedesaan
- 4) Penduduk pribumi telah mengenal dan mengetahui cara menanam berbagai macam jenis tanaman ekspor diantaranya kopi, teh, tebu, nila/ indigo dan tembakau

b. Kebijakan Sistem Politik Liberal/ Pintu Terbuka

Pada paruh kedua abad XIX muncul pertentangan terhadap sistem tanam paksa di Jawa. Pada tahun 1848 untuk pertama kalinya lahir sebuah Konstitusi Liberal yang memberikan kepada parlemen Belanda (*Staten Generaal*) peranan yang lebih besar dalam

menangani urusan-urusan daerah jajahan. Para kelas menengah Belanda yang kaya akibat kegiatan ekonominya di Jawa menuntut adanya perubahan. Mereka mendesak diadakannya perubahan yang liberal ditanah jajahan.

Kekuatan kapitalis swasta dari kelompok liberal menjadi lebih besar dan mendominasi kegiatan ekonomi di Hindia Belanda bersamaan dengan berakhirnya sistem tanam paksa. Para kapitalis ingin menanamkan modalnya pada usaha perkebunan di Indonesia. Oleh karena itu masuknya modal swasta di Indonesia menjadikan negara sebagai pelindung usaha swasta. Pergeseran politik-ekonomi dari konservatif menuju liberal secara langsung tidak berpengaruh bagi kesejahteraan penduduk pribumi, melainkan adanya eksploitasi kolonial terhadap masyarakat desa melalui perkebunan swasta.

Pada periode 1870-1900 disebut sebagai masa liberalisme. Periode tersebut menjadikan kaum pengusaha dan modal swasta diberikan kesempatan yang luas dalam menanamkan modalnya pada bidang industri perkebunan baik di Jawa maupun luar Jawa. Pembukaan perkebunan-perkebunan dijamin dengan Undang-undang Agraria pada tahun 1870.

Berikut isi dari UU Agraria/ Politik Pintu terbuka (1870-1900) yang menandai berakhirnya sistem tanam paksa yang ditandai dengan :

- 1) Dikeluarkanya UU Agraria tahun 1870 dengan persetujuan Parlemen
- 2) Diterapkanya sendi peraturan hukum agraria kolonial di Indonesia
- 3) Isi UU Agraria 1870
 - a) Pasal 1 : Gubernur Jenderal tidak boleh menjual tanah
 - b) Pasal 3 : Gubernur Jenderal dapat menyewa tanah menurut peraturan UU yang berlaku
 - c) Pasal 4 : Diterapkanya hak erfpach untuk paling lama 75 tahun dalam penyewaan tanah
- 4) Sejak tahun 1870 tanah jajahan dijadikan sebagai sasaran imperialisme modern
- 5) Masuknya investor asing/ modal asing

Pelaksanaan Undang-undang Agraria tahun 1870 secara tidak langsung memudahkan politik pintu terbuka yang menghendaki kebebasan investasi oleh swasta terutama swasta asing. Undang-undang agraria menyebutkan bahwa kebebasan dan keamanan penguasaha dijamin. Pelaku yang memiliki hak atas tanah yaitu penduduk pribumi, tetapi orang asing diperkenankan menyewa dari penduduk pribumi (Ismono, 2013:31).

Pihak kolonial memberikan kesempatan pada pihak swasta dalam mengelola tanah yang disewa oleh petani pribumi. Akan tetapi

pemerintah menjamin kesejahteraan pribumi dengan dibuktikannya isi dari salah satu poin penting dalam Undang-undang Agraria yaitu larangan untuk membeli hak milik orang pribumi oleh orang asing.

Menurut Kardiyat (2007:9) dengan di keluarkannya UU Agraria, tanah yang dimiliki oleh para petani tidak bisa dipindahtangankan ke pihak lain. Peraturan ini menghendaki adanya perlindungan agar para petani tidak terdesak oleh bangsa lain. Akan tetapi peraturan ini tidak dijalankan dengan baik oleh pemerintah Hindia Belanda. Peraturan ini menjadikan para petani menyewakan lahannya kepada bangsa lain untuk ditanami berbagai jenis tanaman perkebunan seperti tebu dan tembakau.

Pada tahun 1870-an sistem tanam paksa mulai ditinggalkan dan digantikan dengan sistem perkebunan swasta. Jenis tanaman tropis baru mulai dibudidayakan misalnya pada tahun 1877 di daerah Jawa Barat mulai ditanami karet, di daerah Pantai timur Sumatera (daerah Deli Serdang) perkebunan tembakau dan kelapa sawit mulai dikembangkan.

Dengan adanya UU Agraria berarti pemerintah Hindia Belanda menganut politik pintu terbuka, yang berarti pemerintah kolonial memberi kesempatan kepada kaum modal asing (Belanda, Inggris, Amerika) untuk menanamkan modal sebanyak-banyaknya ke Hindia Belanda. Sistem baru ini membuat Belanda tidak langsung memeras rakyat tetapi lewat kaum kapitalis itulah rakyat Indonesia diperas.

Dengan demikian politik kolonial liberal (1850-1870) berkembang menjadi imperialisme modern (Kardiyat, 2007:9).

Menurut Ismono (2013:31) bahwa penerapan Undang-undang Agraria juga didukung faktor ekstern (dari luar) yaitu dengan dibukanya Terusan Suez di Mesir pada tahun 1869. Peristiwa ini menjadikan semakin tingginya laju pertumbuhan ekspor dan interaksi antara Asia dan Eropa, sehingga perkembangan perkebunan di Hindia Belanda semakin ramai oleh kedatangan bangsa asing.

Perlindungan bagi para petani dimana hak atas pemilikan tanah oleh pribumi dilindungi dengan adanya larangan bagi rakyat pribumi untuk menjual tanahnya kepada pihak asing seperti orang Eropa dan sebagainya. Kebijakan liberal pemerintah kolonial Hindia Belanda direalisasikan dengan munculnya UU Agraria tahun 1870 yang melindungi para kapitalis swasta yang bergerak pada sektor perkebunan serta menjamin persediaan tanah bagi perkebunan (Santi, 2000:113).

Menurut Ismono (2013:31) dampak terbesar dari diterapkannya kebijakan politik terbuka yaitu berkembangnya perkebunan besar diberbagai daerah di Indonesia. Diantaranya di Surabaya memfokuskan pertanian pada perkebunan tebu, di Karesidenan Besuki (Jawa Timur) memfokuskan pada pertanian tembakau. Pembangunan sarana transportasi juga mengalami perkembangan pesat dengan dibangunnya jalur rel kereta api untuk memudahkan

transportasi dalam mengangkut hasil perkebunan dari tempat penanaman menuju pabrik dan pelabuhan.

Masuknya modal swasta yang ditanam pada sektor perkebunan sangat besar pada tahun 1897. Perkembangan ini dapat dibuktikan dari penambahan lahan yang cukup drastis, terutama pada areal perkebunan tebu yang dikelola pihak swasta. Pada tahun 1900 perkembangan luas areal perkebunan tebu menunjukkan peningkatan sangat tajam, pada tiap-tiap Kabupaten menunjukkan peningkatan hampir dua kali lipat (Sukardi, 2014:70).

Pada masa ini hasil ekspor perkebunan meningkat secara pesat, dan menjadi sumber kekayaan baru bagi para tuan tanah, pejabat pribumi dan para pedagang (etnis Tionghoa). Perluasan kepentingan ekonomi kolonial menimbulkan usaha dalam melakukan transformasi politik kolonial pada tingkat bawah yaitu pedesaan. Sehingga masyarakat pedesaan dapat dikatakan melakukan partisipasi dan adaptasi terhadap tujuan politik kolonial dan mempercepat proses masuknya pengaruh kolonial di Indonesia.

Ada beberapa faktor dimana faktor perkembangan swasta dalam bidang perkebunan antara lain: ketersediaanya tanah, tenaga kerja yang murah dan investasi modal. Berikut jenis dari hak-hak tanah antara lain:

1) Hak Egendom

Yaitu hak terkuat dalam hukum barat yang dibatasi dengan ketentuan bahwa penggunaan hak ini tidak boleh mengganggu hak orang lain, demi kepentingan umum maka akan diganti rugi yang layak oleh negara

2) Hak Erfpach

Yaitu hak untuk menggunakan tanah kepunyaan orang lain dengan kekuasaan yang penuh. Kewajiban orang lain yang menggunakan tanah harus membayar sewa kepada pemilik tanah, dan hak ini akan turun temurun selama waktu belum berakhir sesuai dengan perjanjian

3) Hak Opstal

Yaitu hak yang mengatur pendirian rumah, bangunan atau tanaman diatas tanah milik orang lain dimana hak atas tanah negara selama 30 tahun

Dalam sistem baru ini pihak swasta memainkan peran yang dominan dalam kegiatan politik-ekonomi di Jawa, sedangkan pemerintah Hindia Belanda berperan sebagai pengawas dan penarik pajak semata. Perusahaan swasta yang melakukan kegiatan usaha perkebunan tidak diperkenankan memiliki tanah, melainkan dengan menyewa kepada pemerintah selama 75 tahun, dan atau kepada pihak pribumi selama 5 tahun atau 20 tahun.

Pada masa liberal perkebunan yang mengalami pertumbuhan pesat yaitu perkebunan tebu dan tembakau dimana jenis tanaman tersebut merupakan jenis tanaman yang laku keras dipasaran Eropa. Jenis tanaman lainya yang berkembang pesat adalah tembakau di wilayah Karesidenan Besuki (Jawa Timur) dan di Deli (Sumatera Utara). Jenis Tanaman ekspor lainya yaitu teh, kopra, kina dan kopi (Daliman, 2012:50).

Pada tahun 1870-1885 merupakan masa dimana perkebunan berkembang secara pesat. Pada periode ini mereka mampu mendapatkan keuntungan besar dari penjualan tanaman ekspor di pasaran dunia. Di Jawa tenaga kerja kasar cukup tersedia dan sangat murah. Pada tahun 1885 ekspor swasta dari Jawa mengalami 10 kali lipat dari ekspor pemerintah sehingga menjadikan banyak orang Eropa yang berdatangan ke Hindia Belanda untuk bekerja. Periode liberal (1870- 1900) merupakan periode dimana kegiatan eksploitasi sumber-sumber pertanian di Jawa secara besar-besaran.

Setelah tahun 1885 perkembangan industri perkebunan mengalami penurunan dikarenakan jatuhnya harga komoditas ekspor diantaranya jatuhnya harga gula dan kopi di pasaran dunia. Pada tahun 1891 harga tembakau dipasaran dunia juga mengalami penurunan secara drastis sehingga pada tahun ini usaha industri perkebunan mengalami krisis. Banyak perkebunan yang dikelola sebagai usaha milik perorangan mengalami kebangkrutan sehingga pada tahun

1885 dilaksanakan reorganisasi dalam bidang ekonomi dan perkebunan. Sistem liberalisme murni dengan persaingan bebas mulai ditinggalkan dan digantikan oleh suatu tatanan ekonomi terpimpin. Dengan demikian ekonomi Hindia Belanda tidak lagi bersifat individualis meskipun masih bersifat kapitalis.

Menurut Ismono, (2013:31) bahwa masa liberal yang ditandai dengan pelaksanaan Undang-undang Agraria dan politik pintu terbuka menimbulkan berbagai masalah bagi kesejahteraan penduduk pribumi. Permasalahan tersebut diantaranya meliputi pertanahan dan pemukiman. Penerapan kebijakan tersebut menimbulkan kemiskinan. Petani yang dari awal sebagai pemilik tanah dan produsen komoditi ekspor dengan diterapkan kebijakan liberal maka petani menjadi pemilik tanah sewa. Pengelolaan tanah menjadi perkebunan dilakukan oleh pihak swasta yang menyewa tanah kepada penduduk pribumi yang memiliki hak atas tanah.

Penerapan kebijakan liberal selain membawa dampak negatif, juga membawa dampak positif di berbagai daerah diantaranya Surabaya. Pendapatan penduduk pribumi yang awalnya sempat minus pada masa tanam paksa mengalami kenaikan pendapatan pada masa masuknya politik liberal. Pendapatan yang surplus dapat digunakan untuk membayar pajak bahkan bisa untuk menabung. Peningkatan pendapatan juga terjadi di wilayah pedesaan dengan dihapusnya sistem tanam paksa sehingga para petani dapat bekerja di perkebunan

tebu dan pabrik gula serta dapat menanam sawahnya dengan tananaman pangan.

Pada akhir masa liberal harapan dari para pengikut paham liberal bahwa sistem ekonomi liberal akan membawa kemakmuran bagi rakyat Indonesia tidak terwujud. Perkembangan penduduk Jawa yang meningkat pesat dari pada pertumbuhan produksi bahan makanan yaitu padi. Adanya krisis ekonomi pada tahun 1885 juga menambah beban berat bagi penghasilan penduduk Jawa baik berupa upah pekerjaan maupun hasil sewa tanah.

Kebijakan politik liberal bukanya membawa kesejahteraan bagi rakyat pribumi, malah menjadikan rakyat pribumi semakin terpuruk dan miskin. Adapun beberapa faktor yang menyebabkan kemiskinan bagi rakyat Indonesia antara lain:

- 1) Kemakmuran rakyat ditentukan atas dasar kepemilikan tanah dan modal. Maksudnya rakyat Jawa bermodal sedikit sedangkan jumlah penduduk sangat besar
- 2) Tingkat kemajuan rakyat masih rendah sehingga mereka menjadi objek eksploitasi bagi kaum kapitalis
- 3) Rakyat harus menanggung beban biaya Pemerintah Kolonial akibat Perang Aceh
- 4) Pemerintah Hindia Belanda memberlakukan pajak yang tidak berkeadilan dimana mereka hanya meminta pajak kepada golongan berpendapatan rendah pribumi bukan kepada pengusaha kapitalis

- 5) Walaupun sistem tanam paksa telah dihapus, politik *batig slot* belum ditinggalkan. Hasil dari perkebunan dikirimkan ke Negeri Belanda
- 6) Adanya krisis ekonomi tahun 1885 menjadikan upah pekerja dan hasil sewa tanah menjadi turun

Politik Liberal jelas tidak membawa keuntungan bagi perbaikan nasib rakyat Indonesia, melainkan kesengsaraan yang ditanggung oleh rakyat Indonesia. Sehingga terjadilah pemberontakan diberbagai daerah yang menuntut perbaikan kesejahteraan diantaranya terjadi pemberontakan Petani Banten tahun 1888 di Banten (Daliman, 2012:56).

c. Kebijakan Sistem Politik Politik Etis

Menjelang akhir abad XIX timbul masalah-masalah yang dialami oleh penduduk pribumi diantaranya masalah kemiskinan dan kemunduran kemakmuran rakyat. Sehingga pada awal abad XX terjadi perkembangan baru dalam pelaksanaan politik kolonial Hindia Belanda. Van Deventer seorang penulis artikel yang berjudul “Hutang Budi” yang isinya menuntut adanya perbaikan kesejahteraan rakyat Hindia Belanda (Sartono, 1990:32).

Dalam tulisan itu dikemukakan bahwa kemakmuran yang diterima Negeri Belanda atas kerja dan jasa rakyat Indonesia. Sebagai bangsa yang maju haruslah membayar hutang jasa dengan menyelenggarakan trilogi/ trias politika yaitu Irigasi, Edukasi dan

Emigrasi. Atas gagasan politik etis yang dikemukakan oleh Van Deventer, nampaknya Pemerintah Belanda menanggapi tanggapan tersebut yang tercermin dari Pidato Ratu Belanda Wilhelmina yang berjudul *Ethische Richting* atau “Haluan Etis”. Pidato tersebut menegaskan usaha-usaha untuk menanggulangi keadaan ekonomi rakyat yang terpuruk.

Pemerintah Belanda lebih memandang bahwa politik etis merupakan kewajiban mengurus kepentingan negeri jajahan tanpa melibatkan negeri jajahan tersebut sehingga politik etis ini merupakan sebuah dalih untuk melegitimasi kepentingan negeri Belanda di Negeri jajahan semata. Pelaksanaan Politik Etis oleh pemerintah Hindia Belanda tidak pernah terlepas dari kepentingan kolonial.

Politik etis hanya sebuah slogan dari pada kenyataan, yaitu lebih banyak janji dari pada perwujudannya. Pemerintah Hindia Belanda melaksanakan politik etis didasari atas ketakutannya akan kritik dari parlemen di negeri Belanda dan adanya perlawanan rakyat Indonesia secara terus menerus jika pemerintah kolonial membiarkan penderitaan yang dialami oleh penduduk pribumi secara terus menerus.

Nampaknya kebijakan politik etis membawa perubahan lebih baik bagi rakyat Indonesia, namun implementasi politik etis tidak pernah meninggalkan sifatnya yaitu mengeksploitasi negeri jajahan (Daliman, 2012:72).

1) Pengairan (Irigasi)

Selama periode 1900-1920 terjadi perubahan baik dalam pemerintahan serta perbaikan pada bidang-bidang kesejahteraan, irigasi, infrastruktur, pertanian dan peternakan. Pada tahun 1885 telah dibangun berupa waduk diantaranya di Brantas dan Demak seluas 96.000 bahu. Dalam kenyataannya, pembangunan waduk irigasi tidak dibangun untuk mengairi daerah-daerah persawahan milik rakyat melainkan digunakan untuk mengairi daerah-daerah perkebunan milik swasta seperti halnya perkebunan tebu.

Sama halnya pembangunan infrastruktur seperti jaringan rel kereta api pada tahun 1903 di Jawa dan Madura tidak dimaksudkan untuk kepentingan penduduk Indonesia, melainkan untuk memperlancar sarana pengangkutan tanaman hasil perkebunan dari pedalaman menuju pelabuhan dan pabrik-pabrik dan kemudian yang akan diekspor.

2) Pendidikan (Edukasi)

Dalam pelaksanaan pendidikan pada politik etis terdapat dua macam sekolah, antara lain sekolah kelas 1 dan sekolah kelas 2.

Sekolah kelas 1 diperuntukan untuk anak-anak pegawai negeri dan orang-orang yang memiliki kedudukan atau harta, sedangkan sekolah kelas 2 diperuntukan bagi anak-anak kaum pribumi. Sekolah kelas 1 banyak didirikan di ibu kota Karesidenan dan mata pelajaran yang diajarkan berupa membaca,

menulis, berhitung, ilmu bumi, ilmu alam, sejarah dan menggambar.

Pada tahun 1903 di Jawa dan Madura terdapat 245 sekolah kelas 2 negeri, dan 326 sekolah swasta. Pendidikan kelas 2 hanyalah pendidikan tingkat rendah dengan tujuan untuk memenuhi kebutuhan akan pegawai rendah seperti mandor-mandor atau pelayan-pelayan yang bisa membaca. Upah yang mereka terima lebih rendah dibanding dengan upah yang diterima tenaga-tenaga yang berasal dari Eropa. Pembukaan sekolah-sekolah lebih didasari oleh kepentingan pemerintah kolonial Hindia Belanda dan pengusaha swasta dibanding untuk kebutuhan penduduk pribumi (Daliman, 2012:74)

3) Transmigrasi (Emigrasi)

Kepadatan penduduk serta tenaga kerja murah di Jawa dan Madura menjadi peluang besar bagi ketersediaan tenaga kasar diluar Jawa yang sedang melakukan pembukaan perkebunan baru. Pada tahun 1865 jumlah penduduk Jawa dan Madura berjumlah 14 juta penduduk dan pada tahun 1900 mengalami kenaikan dua kali lipat. Hal ini menjadi masalah karena pada umumnya mereka tinggal di daerah yang tanahnya subur sedangkan di daerah tersebut tidak lagi ada tanah yang kosong karena daerah-daerah tersebut pada umumnya sudah ditanami tanaman-tanaman ekspor seperti tebu dan tembakau.

Untuk mengatasi permasalahan ini pemerintah kolonial Hindia Belanda melaksanakan emigrasi, namun pada kenyataannya pelaksanaan emigrasi dimaksudkan untuk memenuhi permintaan akan kebutuhan tenaga kerja yang banyak dibutuhkan di daerah-daerah pembukaan perkebunan baru baik di Jawa maupun diluar Jawa. Pada awal abad XX terjadi emigrasi dari Jawa Tengah ke Jawa Timur. Adanya perluasan perkebunan tebu maka banyak perusahaan gula yang mendatangkan tenaga kerja dari luar daerah dimana perkembangan penduduk lebih cepat dari luas lahan pertanian. (Daliman, 2012:76).

Menurut Cahyo (1995:14) mengatakan sejatinya politik etis ini hanya membawa keuntungan bagi perkembangan Industri Kolonial Hindia Belanda semata, yaitu :

- 1) Banyaknya Industri perkebunan yang berkembang dengan pesat menghendaki adanya saluran irigasi yang intensif, sehingga kebutuhan akan pengairan cukup besar diantaranya perkebunan tebu
- 2) Jumlah pabrik-pabrik yang mengolah hasil perkebunan yang tersebar dipulau Jawa menyebabkan kebutuhan akan tenaga kerja baik berupa pegawai-pegawai rendahan/ mandor dan tenaga administrasi perkebunan maupun industri sangat besar
- 3) Perkembangan Industri perkebunan-perkebunan diluar pulau Jawa yang sangat pesat mengakibatkan kebutuhan akan tenaga

kerja disana besar pula, sehingga tenaga kerja yang murah dan berlimpah dipulau Jawa banyak dikirim keluar daerah dalam rangka pembukaan daerah baru untuk perkebunan modern.

Walaupun terdapat dampak buruk dalam pelaksanaan kebijakan politik etis bagi penduduk Indonesia, politik etis juga membawa dampak positif bagi penduduk Indonesia diantaranya :

- 1) Pembangunan saluran irigasi dilakukan untuk meningkatkan kemakmuran rakyat petani untuk memudahkan para petani dalam mengairi tanaman padi
- 2) Dengan didirikanya sekolah-sekolah rakyat, penduduk pribumi dapat membaca dan berhitung walaupun tarafnya masih sangat sederhana
- 3) Masalah jumlah penduduk Jawa yang padat dapat diatasi dengan kebijakan transmigrasi. Mereka banyak dikirim keluar Jawa diantaranya ke Sumatera, Kalimantan dan daerah lainnya

Oleh karena itu kebijakan politik etis ini banyak ditumpangi oleh kepentingan kaum swasta kapitalis yang bertujuan mendapatkan keuntungan dan melupakan gagasan utamanya yang dikendaki pencetusnya. Politik etis yang semula dimulai dengan penuh semangat pada kenyataanya pelaksanaan kebijakan ini mulai kabur dan semakin diragukan. Keadaan sosial yang tidak mengalami perubahan antara lain: kemiskinan, buta huruf dan kondisi kesehatan yang buruk

sehingga kebijakan politik etis gagal dalam meningkatkan kesejahteraan rakyat Indonesia.

C. Pembelajaran IPS Sejarah

Pembelajaran IPS sejarah menurut Aman, (2011:2) yaitu sebuah pembelajaran yang mengandung tugas menanamkan semangat berbangsa dan bertanah air. Menurut Agung dan Wahyuni, (2013:55) pembelajaran IPS sejarah adalah sebuah pembelajaran yang menanamkan pengetahuan, sikap, dan nilai-nilai mengenai proses perubahan dan perkembangan masyarakat Indonesia dan dunia dari masa lampau hingga kini.

Sedangkan menurut Kochhar, (2008:46) pembelajaran IPS sejarah adalah pembelajaran yang mengembangkan kemampuan peserta didik agar dapat menghargai warisan budaya, menyadari adanya hal-hal kuno serta meningkatkan semangat toleransi dan asimilasi dan perdamaian dunia. Dari pendapat ahli diatas maka dapat peneliti simpulkan bahwa pembelajaran sejarah adalah pembelajaran yang berfungsi menanamkan rasa kebangsaan dan cinta tanah air terhadap bangsanya.

Pembelajaran IPS sejarah disekolah mempunyai tujuan supaya siswa memperoleh pengetahuan berfikir historis dan pemahaman sejarah. Melalui sejarah siswa mampu mengembangkan kompetensi untuk berfikir secara kronologis dan memiliki pengetahuan tentang masa lampau yang dapat digunakan untuk memahami dan menjelaskan proses perkembangan dan perubahan masyarakat, serta keragaman sosial budaya dalam rangka

menemukan dan menumbuhkan jati diri bangsa ditengah-tengah kehidupan masyarakat dunia (Agung dan Wahyuni, 2013:56).

Selain aspek kognitif, pembelajaran IPS sejarah juga mempunyai peran penting kaitanya dengan pendidikan karakter. Menurut Hasan, (2012:87) matapelajaran sejarah mempunyai arti strategis dalam pembentukan watak dan peradaban bangsa yang bermartabat serta dalam pembentukan manusia Indonesia yang memiliki rasa kebangsaan dan cinta tanah air. Pendidikan sejarah baik sebagai bagian dari IPS maupun sebagai matapelajaran merupakan salah satu matapelajaran yang memiliki potensi besar dalam mengembangkan pendidikan karakter.

Materi pendidikan IPS sejarah yang khas dan penuh dengan nilai memiliki potensi yang kuat untuk memperkenalkan kepada peserta didik tentang bangsa dan aspirasinya dimasa lampau. Materi sejarah memberikan informasi mengenai keberhasilan dan kegagalan bangsa dalam menjawab tantangan zaman sehingga menjadi milik bangsa masa kini.

Tindakan apa yang dilakukan para pelaku sejarah yang tidak berhasil mencapai tujuan dan perbuatan apa yang mereka lakukan yang berhasil mencapai tujuan. Materi yang tercantum dalam cerita sejarah bukan hanya cerita sukses tetapi juga cerita kegagalan. Keberhasilan dan kegagalan adalah hal yang terjadi dalam kehidupan nyata manusia. Kedua sisi kehidupan itu, keberhasilan dan kegalan menjadi pelajaran penting.

Pembelajaran Sejarah pada Sekolah Menengah Pertama diintegrasikan dalam wadah pembelajaran Ilmu Pengetahuan Sosial terpadu, sehingga mata

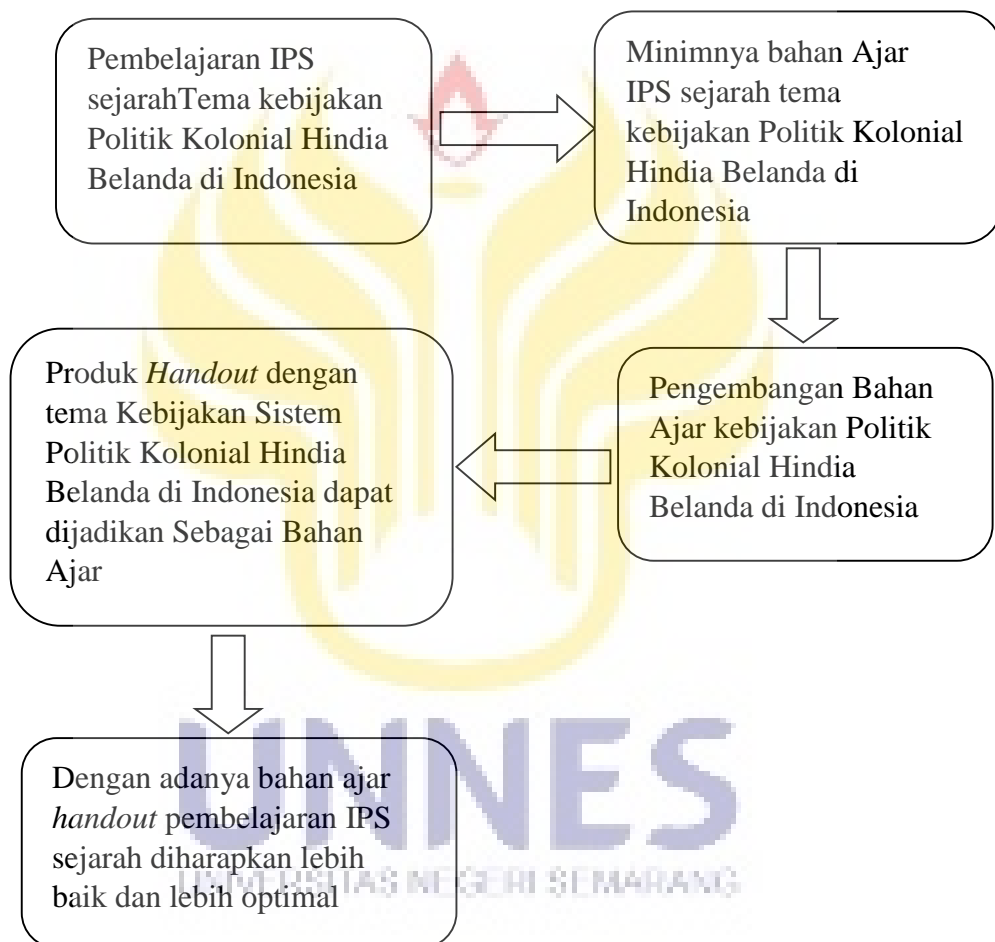
pelajaran sejarah tergabung dengan matapelajaran lainya seperti geografi dan ekonomi. Pembelajaran Sejarah dalam kurikulum 2013 pada kelas VIII terbagi dalam beberapa tema dan subtema.

Pembelajaran IPS yang mencakup sejarah masuk pada semester satu yang termuat dalam Tema I subtema pengaruh keunggulan lokasi terhadap kolonialisasi Barat di Indonesia. Sedangkan dalam penelitian ini masuk dalam subtema pengaruh kebijakan pemerintah kolonial terhadap bangsa Indonesia.



D. Kerangka Berfikir

Kerangka berpikir merupakan model konseptual tentang bagaimana teori berkorelasi dengan berbagai faktor yang telah diidentifikasi sebagai masalah yang penting (Sugiyono, 2010:388). Kerangka berpikir dari penelitian ini adalah sebagai berikut:



Gambar 1. Skema Kerangka Berfikir

BAB V

SIMPULAN DAN SARAN

A. Simpulan

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan yang dilakukan oleh peneliti, maka dapat disimpulkan bahwa:

1. Hasil belajar siswa rendah dikarenakan minimnya bahan ajar yang digunakan siswa dalam belajar. Bahan ajar yang selama ini digunakan siswa dalam pembelajaran IPS Sejarah Kelas VIII SMP N 2 Kendal Tahun ajaran 2015-2016 berupa buku paket siswa, lembar kerja siswa (LKS) yang sedikit memuat materi kebijakan kolonial di Indonesia
2. Proses pengembangan bahan ajar berbentuk *handout* dengan judul “kebijakan sistem politik kolonial Hindia Belanda tahun 1830-1920 di Indonesia” meliputi beberapa tahap yaitu potensi dan masalah, pengumpulan data, desain produk, validasi desain I, revisi desain, validasi desain II dan uji coba produk
3. Bahan ajar yang dikembangkan oleh peneliti berbentuk *handout* dinyatakan layak digunakan sebagai bahan ajar dalam pembelajaran IPS Sejarah kelas VIII SMP N 2 Kendal materi pokok kebijakan kolonial di Indonesia sesuai dengan standar kelayakan bahan ajar menurut BSNP 2014 dengan hasil validasi II materi 94,54% dan validasi II media 94,96% serta hasil tanggapan guru 96,25% dan tanggapan siswa 90,12%

B. Saran

Berdasarkan hasil kesimpulan diatas, maka peneliti memberikan beberapa saran diantaranya:

1. Kerangka penelitian yang dikembangkan oleh peneliti dapat memberikan wawasan baru bagi pengembangan bahan ajar materi-materi IPS Sejarah lainnya khususnya pada sekolah menengah pertama sehingga dapat memberikan manfaat bagi kegiatan proses pembelajaran guru dan siswa
2. Pada penyusunan bahan ajar dapat memperhatikan Kompetensi Inti dan Kompetensi Dasar materi yang akan dikembangkan sehingga tujuan dari pembuatan bahan ajar jelas
3. Bahan ajar berbentuk *handout* kebijakan sistem politik kolonial Hindia Belanda tahun 183-1920 di Indonesia dapat digunakan sebagai bahan ajar pada materi pokok kebijakan kolonial di Indonesia dalam pembelajaran dikelas khususnya di SMP N 2 Kendal

DAFTAR PUSTAKA

- Agung, Leo S dan Wahyuni, Sri. 2013. *Perencanaan Pembelajaran Sejarah*. Yogyakarta: Ombak
- Aman. 2011. *Model Evaluasi Pembelajaran Sejarah*. Yogyakarta: Ombak
- Ana Armawati. 2012. *Pengembangan Materi Ajar Sejarah Pokok Bahasan Tanam Paksa Kelas XI IPS Semester II di SMA N 1 Gemuh Kabupaten Kendal*. Skripsi. Semarang: Fakultas Ilmu Sosial Unnes
- Anshoriy, Nasruddin. 2008. *Bangsa Inlander (Potret Kolonialisme di Bumi Nusantara)*. Yogyakarta: LKIS
- Arikunto, Suharsimi. 2013. *Prosedur Penelitian: Suatu Pendekatan Praktik*. Jakarta: Rineka Cipta
- Daliman. 2012. *Sejarah Indonesia Abad XIX- Awal Abad XX: Sistem Politik Kolonial dan Administrasi Pemerintahan Hindia Belanda*. Yogyakarta: Ombak
- Daryanto. 2010. *Belajar dan Mengajar*. Bandung: Yrama Widya
- Fatimah Zahra. 2014. *Pengembangan Bahan Ajar Sejarah Pokok Bahasan Islamisasi Berbasis Peninggalan Sejarah Masjid agung Demak Pada Siswa Kelas XI IPS SMA N 1 Dempet*. Skripsi. Semarang: Fakultas Ilmu Sosial Unnes
- Hasan, S. Hamid. 2012. *Pendidikan Sejarah Untuk Memperkuat Pendidikan Karakter*. Dalam Paramita. No. 1. Hal. 81-95
- Hermawati, Mifta. 2013. *Tanam Paksa Sebagai Tindakan Eksploitasi*. Dalam Avatara. No. 1. Hal. 64-70
- Ika Widya Kusumastuti. 2015. *Pengembangan Bahan Ajar Sejarah Indonesia Materi Pokok Peristiwa Rengasdengklok dan Perumusan Teks Proklamasi Kelas XI MIA Semster II di SMA N 1 Batang*. Skripsi. Semarang: Fakultas Ilmu Sosial Unnes
- Ismono. 2013. *Perkembangan Ekonomi Surabaya Setelah Penerpan Undang-Undang Agraria dan Politik Pintu Terbuka (1870-1890)*. Dalam Avatara. No. 1. Hal. 30-33
- Kartodirdjo, Sartono. 1990. *Pengantar Sejarah Indonesia Baru: Sejarah Pergerakan Nasional*. Jakarta: Gramedia
- Kochhar, S.K. 2008. *Pembelajaran Sejarah (Teaching of History)*. Terjemahan Purwanta dan Yovita Hardiwati. Jakarta: Grasindo

- Listya Septiwiharti. 2015. *Pengembangan Bahan Ajar Berbentuk Booklet Sejarah Indonesia Pada Materi Pertempuran Lima Hari di Semarang Terhadap Minat Belajar Siswa Kelas XI IPS SMA N 1 Semarang Tahun Ajaran 2014/2015*. Skripsi. Semarang: Fakultas Ilmu Sosial Unnes
- Loomba, Ania. 2016. *Kolonialisme/ Pascakolonialisme*. Terjemahan Hartono Hadikusumo. Yogyakarta: Narasi-Pustaka Proethea
- Majid, Abdul. 2009. *Perencanaan Pembelajaran: Mengembangkan Standar kompetensi Guru*. Bandung: PT Remaja Rosdakarya
- Marwati, Djoened Poesponegoro dan Nugroho Notosusanto. 1993. *Sejarah Nasional Indonesia IV*. Jakarta: Balai Pustaka
- Moleong, Lexy J. 2007. *Metodologi Penelitian Kualitatif*. Bandung: PT Remaja Rosdakarya
- Niel, Robert Van. 2003. *Sistem Tanam Paksa Di Jawa*. Terjemahan Hardoyo. Jakarta: Pustaka LP3ES Indonesia
- Prastowo, Andi. 2013. *Panduan Kreatif Membuat Bahan Ajar Inovatif*. Yogyakarta: Diva Press
- Putra, Nusa. 2011. *Research and Development Penelitian dan Pengembangan: Suatu Pengantar*. Jakarta: PT RajaGrafindo Persada
- Ricklefs, M C. 1998. *Sejarah Indonesia Modern*. Terjemahan Dharmono Hardjowidjono. Yogyakarta: UGM Press
- Setyosari, H. Punaji. 2013. *Metode Penelitian Pendidikan dan Pengembangan*. Jakarta: Kencana
- Sudaryanto, dkk. 2007. *Peninggalan Masa Kolonial di Jawa Tengah*. Semarang: Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi Jawa Tengah
- Sudjana, Nana. 2009. *Penilaian Hasil Proses Belajar Mengajar*. Bandung: Remaja Rosdakarya
- Sudjana, Nana dan Rivai, Ahmad. 2009. *Teknologi Pengajaran*. Bandung: Sinar Baru Algensindo
- Sugiyono. 2011. *Metode Penelitian Pendidikan: Pendekatan kuantitatif, kualitatif dan R&D*. Bandung: Alfabeta
- 2007. *Statistika Untuk Penelitian*. Bandung: Alfabeta
- Sukardi, Tanto. 2014. *Tanam Paksa Di Banyumas (Kajian Mengenai Sistem, Pelaksanaan dan Dampak Sosial Ekonomi)*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar

- Sukmadinata, Nana Syaodih. 2009. *Metode Penelitian Pendidikan*. Bandung: Remaja Rosdakarya
- Sondarika, Wulan. 2014. *Dampak Culturstelsel (Tanam Paksa) Bagi Masyarakat Indonesia dari Tahun 1830-1870*. Dalam *Artefak*. No. 1. Hal. 59-66
- Suroyo, A.M. Djuliaty. 2000. *Eksplorasi Kolonial Abad XIX (Kerja Wajib di Keresidenan Kedu 1800-1890)*. Yogyakarta: Yayasan Untuk Indonesia
- Suryani, Nunuk dan Agung, S. Leo. 2012. *Strategi Belajar Mengajar*. Yogyakarta: Ombak
- Utami, Santi Muji. 2000. *Pedesaan Jawa Abad XIX: Pembangunan Dalam Konteks Kolonial*. Dalam *Paramita*. No. 2. Hal. 111-123
- Utomo, Cahyo Budi. 1995. *Dinamika Kebangkitan Bangsa Indonesia Dari Kebangkitan Hingga Kemerdekaan*. Semarang: IKIP Semarang Press
- Virdia Apriliyani. 2015. *Pengembangan Bahan Ajar Pembelajaran Sejarah Proses Islamisasi Berbasis Konservasi Terkait Dengan Kesadaran Sejarah di SMA 2 Kudus*. Skripsi. Semarang: Fakultas Ilmu Sosial Unnes
- Vlekke, Bernard H M. 2008. *Nusantara: Sejarah Indonesia*. Terjemahan Samsudin Berlian. Jakarta: Gramedia
- Wasino. 2008. *Berjuang Menjadi Wirausaha : Sejarah Kehidupan Kapitalisme Bumi Putera Indonesia*. Semarang: Unnes Press
- Widharyanto, A. Kardiyat. 2007. *Kebijakan Ekonomi Kolonial Tahun 1830-1901*. Dalam *Historia Vitae*. No. 1. Hal. 1-14
- Zulkarnain. 2011a. *Dampak Penerapan Sistem Tanam Paksa Bagi Masyarakat*. Dalam *Informasi*. No. 1. Hal. 65-81
- 2011b. *Kesengsaraan Masyarakat Jawa/ Cultuur Stelsel (Kajian Sosial Ekonomi)*. Dalam *Istoria*. No. 1. Hal. 30-46